

# Konsep Dasar Profesi

Drs. Purwono, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Profesi pustakawan mulai tumbuh pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah perkembangannya, profesi ini mendapat kritikan tajam dari para sosiolog yang meneliti masalah profesi. Sejumlah sosiolog meragukan pustakawan sebagai sebuah profesi. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa pustakawan tidak akan menjadi profesi penuh.

Saat ini profesi pustakawan telah diakui sebagai profesi penuh. Lebih dari itu, profesi ini telah berkembang dengan pesat seperti profesi lain. Ledakan informasi yang terjadi pertengahan kedua abad ke-20, telah merubah stereotip pustakawan dari "*book custodian*" menjadi "*information specialist*" yang diperlukan oleh setiap bidang kehidupan umat manusia. Akan tetapi, pustakawan masih bersifat pegawai suatu organisasi atau lembaga, belum dapat menjanjikan layanan secara mandiri, seperti dokter atau pengacara.

Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Profesi Pustakawan maka dalam modul ini kita tinjau lebih dahulu tentang arti perpustakaan, pustakawan dan kepustakawanan.

Perpustakaan pada saat ini bukan lagi sebagai tempat untuk menyimpan buku dengan tata urutan tertentu, namun sudah berubah menjadi sumber informasi. Koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi berbentuk multimedia, yaitu bukan saja hanya karya cetak, melainkan sudah dalam berbagai media. Hal ini sesuai dengan UU No. 43 tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Dalam modul satu ini, dibahas mengenai konsep profesi, profesional dan profesionalisme pustakawan, arti dan fungsi perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan tempat dimana pustakawan menjalankan profesinya.

Setelah mempelajari modul satu ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. menyebutkan arti profesi, profesional, dan profesionalisme;
2. menyebutkan arti perpustakaan, pustakawan dan kepustakawanan;
3. menjelaskan kata-kata yang berkaitan dengan perpustakaan;
4. menjelaskan jenis dan fungsi perpustakaan;
5. menjelaskan tipe-tipe perpustakaan.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Profesi, Profesional dan Profesionalisme

Profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan. Istilah “profesi” biasa digunakan untuk mengacu pada jenis pekerjaan tertentu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa istilah profesi tidaklah begitu saja dapat disamakan dengan pekerjaan, karena ada jenis-jenis pekerjaan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan jabatan seseorang dalam organisasi, yang tidak biasa atau kurang tepat untuk disebut sebagai profesi. Pekerjaan seorang presiden, menteri, atau pejabat negara lainnya, misalnya, tidak biasa disebut sebagai profesi, meskipun presiden atau pejabat tersebut barangkali memangku jabatannya seumur hidup.

Jack Halloran (1978) membedakan pekerjaan (*occupation*) dan profesi (*profession*) berdasarkan status sosial jenis-jenis pekerjaan. Menurutnya, usaha-usaha untuk memprofesionalkan pekerjaan adalah usaha untuk mendapat pengakuan sosial yang lebih tinggi dari pekerjaan tersebut. Kadang-kadang sifat dari suatu pekerjaan menuntut pengakuan sosial yang lebih tinggi.

Pada tahun 1933, Carr-Saunders dan Wilson menulis buku yang kemudian dinilai sebagai cikal-bakal karya tulis tentang profesi. Menurut kedua pakar tersebut, pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi antara lain teknik arsitektur, teknik mesin, teknik kimia, akuntansi, dan riset. Selain itu, Saunders dan Wilson juga menekankan aspek organisatoris dari profesi. Profesi, menurut mereka, perlu diorganisasi, sebab dengan begitu orang-orang yang memiliki profesi tersebut akan dapat mempertanggungjawabkan pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya secara kolektif organisatoris.

Apabila dilacak dari akar sejarahnya, walaupun istilah profesi baru muncul dan semakin intens penggunaannya pada era modern, sejak zaman Yunani klasik orang sudah mempraktikkan substansinya. Pada waktu itu orang telah mengadakan pembedaan antara pekerjaan yang sifatnya *honorable* dan pekerjaan yang *useful*. Pekerjaan yang *honorable* banyak dilakukan oleh kalangan aristokrat yang umumnya lebih banyak waktu luangnya dibandingkan masyarakat biasa. Pekerjaan jenis ini tidaklah menuntut imbalan materi, sebab yang diperlukan dari kalangan ini adalah

rasa hormat yang diperoleh dari kemampuan olah pikirnya. Dari kalangan inilah kemudian muncul pekerjaan, seperti filsafat, arithmatika, astronomi, dan lain-lain.

Berbeda dari pekerjaan *honorable*, pekerjaan *useful* dilakukan oleh masyarakat biasa sebagai usaha untuk mendapatkan nafkah segera. Pekerjaan jenis ini selain membutuhkan keterampilan teknik tertentu juga akan memberikan kemanfaatan langsung bagi banyak orang. Pekerjaan yang masuk kategori jenis ini adalah teknik bangunan, kesenian, pengobatan, dan pekerjaan-pekerjaan praktis lainnya. Pekerjaan *useful* inilah yang dalam perkembangannya, khususnya setelah ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat, justru mendapat status yang cukup tinggi di kalangan masyarakat dan orang yang menekuninya memberi predikat pekerjaan-pekerjaan ini sebagai profesi.

Dewasa ini pekerjaan-pekerjaan yang dapat disebut sebagai profesi tidak lagi terbatas yang teknis dan praktis, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain yang abstrak-teoretis. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, apabila orang menyebut pekerjaan-pekerjaan, seperti guru, pengacara, wartawan, dan sebagainya, sebagai profesi. Berdasarkan sejarah pemakaiannya, istilah profesi biasa digunakan untuk mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus, yang dilakukan sebagai pekerjaan utama, dalam artian bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan sekadar hobi atau pekerjaan sampingan. Profesi dengan demikian bukanlah pekerjaan itu *ansich*, tetapi juga berkaitan dengan orang yang menjalaninya.

Profesi berkaitan dengan profesional artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan atau merupakan bagian dari profesi. Istilah “profesional” biasa dipergunakan baik sebagai kata benda (*noun*) maupun kata sifat (*adjective*). Sebagai kata benda, istilah tersebut menunjuk pada orang-orang yang memiliki profesi tertentu. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan istilah profesional dalam pengertian ini biasanya ditujukan bagi para pengusaha pada umumnya dan orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu yang menyebabkan mereka memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengetahuan dan keterampilan tersebut biasanya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan (*training*) khusus dan di sertifikasi melalui ujian-ujian yang diselenggarakan oleh suatu asosiasi profesional.

Sementara itu, sebagai kata sifat istilah profesional menunjuk pada mutu kinerja seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan pekerjaannya.

Profesional lebih merupakan nilai atau norma yang dijadikan patokan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak.

Sebagai kata sifat, istilah profesional juga digunakan untuk menunjukkan sifat pekerjaan yang dikerjakan, dalam artian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan sebagai sumber penghasilan utama. Pengertian ini menjadi sangat jelas bila kita membuat perbedaan antara pekerjaan yang profesional dan yang amatir(an), khususnya di dunia olah raga dan hiburan. Seorang olahragawan yang amatir adalah yang bermain atau bertanding sekadar untuk memuaskan hobi, sedangkan olahragawan yang profesional adalah mereka yang memanfaatkan keahliannya berolahraga sebagai sarana untuk menghasilkan uang.

Kita juga mengenal istilah profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna, yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional (Longman, 1987). “Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme berarti “*The expertness characteristic of a professional person*”, kalimat tersebut mempunyai arti “karakteristik kemahiran dari seorang profesional” maka apabila Anda berkarier dalam hal apapun, tunjukkan sikap profesionalisme diri Anda.

Pada umumnya orang menggunakan istilah profesionalisme untuk menunjukkan etos kerja yang profesional. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki profesionalisme tinggi dapat dinilai bahwa orang atau kelompok orang tersebut memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi atas pekerjaan dan komunitas yang terkait dengan pekerjaannya tersebut.

Dengan pengertian tersebut, profesionalisme dapat dipandang pula sebagai spirit atau bahkan sikap hidup yang dimiliki individu dan/atau kelompok yang menempatkan pekerjaan sebagai hal yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Profesionalisme akan menentukan reputasi dan masa depan pekerjaan seseorang, sebab dengan menjunjung tinggi sikap hidup ini maka rasa hormat dan kepercayaan orang lain akan semakin meningkat, yang berarti juga akan meningkatkan nilai diri dan imbalan (*reward*).

*Profesionalisme* adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian yang

tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima panggilan tersebut -- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (Wignjosobroto, 1999). Dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa (*occupation*) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/atau kekayaan materiil.

Lebih lanjut Wignjosobroto (1999) menjabarkan profesionalisme dalam tiga watak kerja yang merupakan kegiatan pemberian “jasa profesi” (dan bukan okupasi) ialah bahwa:

1. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapakan imbalan upah materiil;
2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat;
3. Kerja seorang profesional – diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral – harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.

Ketiga watak kerja tersebut mencoba menempatkan kaum profesional (kelompok sosial berkeahlian) untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. Kalau di dalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar “tanda kehormatan” (honor) demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi pekerja upahan saja.

Sementara itu, para sosiolog berpendapat bahwa profesi itu merupakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Carr-Sander (1933) dalam kuliahnya di *Oxford University* berpendapat bahwa profesi mulai berkembang

pada masa revolusi industri. Revolusi ini telah menimbulkan berbagai jenis pekerjaan baru – yang disebut sebagai profesi – yang diperlukan oleh masyarakat yang harus dilaksanakan secara khusus. Ia mendefinisikan istilah profesional dalam pengertian *skill* atau keterampilan dan latihan khusus, bayaran, atau gaji minimum, pembentukan asosiasi profesional, dan adanya kode etik yang mengatur praktek profesional.

Profesi merupakan jenis pekerjaan tetap dan penuh. Artinya, profesi merupakan pekerjaan yang layanannya diperlukan oleh masyarakat atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus. Tanpa layanan tersebut anggota masyarakat akan terganggu kehidupannya.

Orang yang melaksanakan profesinya dengan mengikuti norma dan standar profesi disebut sebagai profesional. Sedangkan, istilah profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma, standar dan kode etik serta memberi layanan terbaik kepada klien.

Beberapa ciri dari profesionalisme adalah mempunyai:

1. Keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.
2. Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Kalau menyimak perkembangan profesi, timbul tanda tanya apakah pustakawan dapat digolongkan ke dalam profesi atau tidak. Hal ini tergantung pada kemampuan dan tanggapan pustakawan terhadap profesi dan jasa yang diberikan pustakawan serta pandangan masyarakat itu sendiri terhadap pustakawan. Di Indonesia, pemerintah menghargai pustakawan sebagai tenaga profesional. Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan

terbuka lebar kesempatan dan pengakuan terhadap profesionalisme pustakawan.

Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab dan pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan.

Keahlian merupakan dasar dalam menelurkan hasil kerja yang tidak sembarang orang dapat menghasilkannya, dan dengan keahlian ini pustakawan diharapkan dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh orang lain. Tanggung jawab, dalam arti bahwa kegiatan yang dilakukan pustakawan tidak hanya sekedar melakukan tugas rutin, tetapi melakukan kegiatan yang bermutu dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan lewat prosedur kerja yang benar.

Pengabdian berarti bahwa pustakawan melakukan kegiatan perpustakaan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat pemakai perpustakaan pada khususnya serta kepentingan nusa dan bangsa pada umumnya. Dalam hubungan ini, pustakawan dituntut pula untuk mengikuti secara terus menerus serta menyesuaikan kegiatannya dengan perkembangan keperluan pemakainya serta tujuan pembangunan.

Pengembangan keahlian, mensyaratkan bahwa pustakawan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menjamin kemutakhiran keahliannya. Dengan keahlian yang makin meningkat, pustakawan profesional akan mampu memberikan hasil dan mutu kerja yang berbobot. Daya nalar dan cakrawala wawasan pustakawan juga akan makin meningkat serta sumbangannya kepada nusa dan bangsa pun akan makin besar. Dengan ciri-ciri pustakawan profesional tersebut maka tidaklah perlu disangsikan adanya dukungan dan pengakuan terhadap kegiatan perpustakaan serta pekerjaan pustakawannya.

Profesi merupakan pekerjaan khusus dan dengan persyaratan tertentu. Tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Dalam hal ini Lynn (1965) menyatakan: “*A Profession delivers esoteric services based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of client*”. Suatu profesi menyajikan pelayanan yang hanya dilakukan oleh orang tertentu yang secara sistematis diformulakan dan diterapkan untuk memenuhi

kebutuhan para pelanggannya. Dengan demikian tidak semua pekerjaan disebut profesi dan tidak semua orang mampu melaksanakan suatu profesi.

Profesional disini tidak sekedar mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik seperti halnya tukang tambal ban yang katanya profesional. Istilah ini pun berbeda dengan penerapan profesional dalam dunia olah raga, seperti petinju profesional, yakni petinju bayaran yang memang hidupnya tergantung dari bayaran bermain tinju maupun olah raga lain. Dalam hal ini berlawanan dengan kata “amatir” yang menjadikan tinju sebagai hobi.

Kinerja profesional adalah kinerja yang memerlukan syarat intelektual dan bukan melulu keterampilan. Dengan demikian, apabila pustakawan baru mampu melakukan pekerjaan fisik semata mestinya tidak semudah itu mengaku sebagai tenaga yang profesional, sebab syarat intelektual itu memerlukan ilmu pengetahuan dan sains tertentu.

Abraham Flyner seperti yang dikutip Kleingater (1967) menyatakan bahwa suatu profesi itu minimal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu merupakan:

1. Pekerjaan intelektual, yakni melakukan kegiatan yang merupakan intelegensia yang bebas pada suatu masalah dengan tujuan untuk menguasai dan memahaminya.
2. Pekerjaan praktek, tugas-tugas itu tidak hanya berupa teori-teori akademis, akan tetapi dapat diterapkan/dipraktekkan.
3. Pekerjaan keilmuan, yaitu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berasal dari suatu cabang ilmu pengetahuan.
4. Sistematis, yakni memiliki standar dan prosedur pelaksanaan, serta memiliki parameter hasilnya.
5. Pekerjaan altruisme, yakni jenis kegiatan yang menitik beratkan pada kepuasan masyarakat yang dilayaninya dan bukan sekedar mencari kepuasan diri.

Pustakawan sebagai profesi semula memang menimbulkan pro dan kontra. Ilmuwan yang meragukan profesi pustakawan beralasan bahwa ilmu perpustakaan masih diragukan sebagai cabang ilmu pengetahuan itu sendiri karena dianggap masih miskin teori. Bahkan, sosiolog William J. Goode (196) berpendapat bahwa kepustakawanan tidak akan pernah mencapai pada derajat profesi. Beliau berargumentasi bahwa pustakawan sangat lemah dalam mempengaruhi sikap pelanggannya. Disamping itu, dinyatakan bahwa gambaran masyarakat terhadap pustakawan masih rendah. Masyarakat

datang/mengunjungi perpustakaan karena mereka itu butuh buku/informasinya dan bukan semata-mata butuh pustakawannya. Hal ini berbeda dengan profesi dokter yang memang diperlukan adalah keahlian dokternya itu dan bukan rumah sakitnya. Demikian pula halnya dengan profesi-profesi yang lain.

Menurut Tjitropranoto (1995) melihat tantangan masa depan, peluang yang ada dan masalah yang dihadapi saat ini maka kualitas pustakawan yang diharapkan di masa datang adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya mempunyai kemampuan untuk berorientasi kepada keperluan pemakai perpustakaan. Tenaga yang bertugas di perpustakaan harus dapat memenuhi keperluan pemakai perpustakaan atau bukan mempersulitnya.
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi keperluan pemakai.
3. Memiliki kemampuan teknis dibidang perpustakaan paling sedikit setara dengan pendidikan sarjana muda (diploma 2) dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
4. Dapat berbahasa asing khususnya Bahasa Inggris terutama untuk memudahkan berhubungan dengan dunia internasional.
5. Mampu mengembangkan teknik dan prosedur kerja dibidang perpustakaan.
6. Mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan pengembangan perpustakaan.
7. Mampu melaksanakan penelitian dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara mandiri.

Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat diharapkan muncul dengan sendirinya ataupun berdasarkan pengalaman bekerja di perpustakaan, tetapi harus dilakukan melalui suatu kegiatan pembinaan yang intensif dan secara berkelanjutan.

Profesi Pustakawan sebenarnya telah lama muncul hampir sama dengan profesi-profesi lain. Cukup banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa profesi pustakawan ini sudah lama ada, misalnya saja pada tahun 669-636 SM di Babilonia dan Assyria telah disimpan 10.000 tablet tanah liat karya Ashurbanipal raja Assyria. Demikian pula, di Mesir pada tahun 367-283 SM telah berdiri perpustakaan paling besar, yaitu di Aleksandria yang didirikan oleh Ptelomeus yang memiliki koleksi lebih dari 400.000 buah.

Perpustakaan-perpustakaan tersebut dikelola dengan baik oleh tenaga-tenaga yang profesional maupun para ahli ilmu pengetahuan.

Profesi (*profession*) berbeda dengan pekerjaan (*occupation*), sebab suatu profesi memerlukan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, memiliki organisasi, berorientasi pada jasa dan memiliki kode etik. Seorang profesional harus mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri dan adanya kendali organisasi profesi terhadap orang yang ingin berkecimpung dalam bidang tersebut serta berkarya dalam bidangnya (Sulistyo-Basuki, 1994). Tugas-tugas kepustakawanan dapat diakui sebagai profesi mengalami diskusi panjang karena memang semula ada yang berpendapat bahwa pekerjaan itu tidak layak sebagai profesi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Pierce Butler (1961) yang meragukan pengetahuan perpustakaan sebagai suatu cabang ilmu karena tidak mampu mengemukakan teori, karena adanya teori ini merupakan prasyarat suatu ilmu pengetahuan. Disamping praktek kepustakawanan terlalu mudah dan cepat untuk dipelajari (Wirawan, 1993).

Bagaimana Pustakawan memenuhi syarat sebagai profesi? Para ilmuwan sependapat bahwa suatu profesi merupakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan profesi tersebut antara lain dapat Anda baca alamat akun berikut ini (Noorika Retno Widuri),

<http://noorikaahmad.multiply.com/journal> 14-1-2009):

## 1. Pengetahuan dan Keterampilan Khusus

Suatu profesi memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, yang tidak dimiliki oleh orang awam, atau mereka yang berasal dari profesi lainnya. Pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut memberikan kompetensi kepada profesional untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam kode etik pustakawan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

Profesi pustakawan telah memenuhi ilmu pengetahuan. Seorang pustakawan profesional diisyaratkan mempunyai pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya.

Seperti ilmu lainnya, ilmu perpustakaan berkembang dari suatu seni menjadi sains. Objek ilmu perpustakaan adalah mengenai bahan pustaka –

dalam pengertian fisik dan isinya, metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya – kepada para pemakai jasa perpustakaan untuk keperluan kehidupannya. Objek ilmu perpustakaan kemudian dikembangkan sehingga juga meliputi identifikasi dan penyajian informasi, perilaku pustakawan dan para pemakai jasa perpustakaan.

## **2. Adanya Sebuah Asosiasi atau Organisasi Keahlian**

Tenaga profesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan benar-benar mewakili kepentingan profesi. Dalam dunia pustakawan, dikenal organisasi bernama *Library Association* (Inggris), *American Library Association* (AS), dan Ikatan Pustakawan Indonesia (Indonesia).

## **3. Pendidikan Profesi**

Struktur pendidikan pustakawan harus jelas. Dalam hal ini organisasi pustakawan Amerika (ALA) lebih berhasil daripada rekannya di Inggris atau Indonesia, sebab ALA berhak menentukan kualifikasi pendidikan formal pustakawan. Bila di Inggris, LA hanya berhak menyelenggarakan pendidikan pustakawan tingkat teknis. Sedangkan di Amerika, ALA berhak menentukan akreditasi sekolah perpustakaan. ALA berhak menentukan isi intelektual perkuliahan yang sesuai dengan ketentuan ALA. Bagi sekolah perpustakaan yang belum mendapat akreditasi dari ALA maka lulusannya akan memperoleh kesulitan bila mencari pekerjaan karena persyaratan pekerjaan lazimnya lulusan sekolah perpustakaan yang diakui ALA.

## **4. Adanya Kode Etik**

Kode etik adalah sistem norma nilai-nilai atau aturan profesional yang secara tegas – biasanya tertulis – menyatakan apa yang benar dan apa yang baik. Jadi merupakan apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional dan apa yang harus dihindari.

Menurut Shelfer (1980), kode etik profesional merupakan prinsip-prinsip dasar perilaku yang benar dan yang salah dalam interaksi sosial umumnya dan masalah khusus dari profesi. Kode etik merupakan pernyataan ideal, prinsip-prinsip dan standar perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip pribadi.

Tujuan kode etik adalah untuk memastikan profesional akan memberikan layanan atau hasil kerja dengan kualitas tertinggi dan paling

baik untuk kliennya. Jadi, untuk melindungi para pemakai jasa dari perbuatan atau tindakan yang tidak profesional.

Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyusun kode etik profesi pustakawan. Namun, kode etik tersebut masih sangat sederhana dengan belum menyinggung masalah prinsipil bagi profesi pustakawan. Kode etik tersebut hanya mengemukakan kewajiban, namun tidak mengemukakan hak pustakawan, juga tidak menyinggung masalah esensi dari perpustakaan dan bahan pustaka, dua hal yang sangat esensial bagi profesi pustakawan.

## **5. Berorientasi Pada Jasa**

Kepustakawanan berorientasi pada jasa. Dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan pengetahuan dan teknik khusus yang harus dimiliki pustakawan. Namun, berbeda dengan profesi lainnya, pustakawan tidak memungut imbalan dari pembaca dan pustakawan dapat dihubungi setiap kali berada di perpustakaan dengan tidak memandang keadaan pembaca.

## **6. Adanya Tingkat Kemandirian dan Otoritas**

Pustakawan sebagai tenaga profesional, harus mandiri, dan bebas dari campur tangan pihak luar. Pada kenyataannya kemandirian profesional sulit diterapkan, khususnya profesi pustakawan. Semua perpustakaan merupakan lembaga atau organisasi yang berbirokrasi. Akibatnya kemandirian pustakawan bersifat ganda dalam arti disatu pihak dia dapat mandiri (umpamanya pustakawan bebas) namun dipihak lain ia terikat pada pemerintah sehingga sering disebut adanya kesetiaan ganda. Pada pustakawan yang bekerja dipihak swasta atau perpustakaan khusus, sifat kemandirian lebih kurang terbatas dari pada pustakawan yang bekerja di kantor pemerintah.

## **7. Internship**

Untuk menjamin kemampuan menerapkan ilmunya, calon profesional diisyaratkan melaksanakan *internship* atau praktek kerja waktu mengikuti pendidikan. Mereka disyaratkan melaksanakan *internship* minimal suatu waktu tertentu. Dalam *internship*, mereka menerapkan teori yang mereka pelajari di bangku kuliah dalam kegiatan profesi. Karena ilmu dan teknologi terapannya berkembang, kebiasaan *internship* diteruskan ketika profesional

bekerja dalam bidangnya. Disini para pustakawan mengadakan saling kunjung ke perpustakaan-perpustakaan, mengikuti *workshop* untuk mempelajari penemuan baru dan melaksanakan studi komparatif.

## 8. Budaya Profesi

Budaya profesi adalah kebiasaan atau tradisi, norma atau nilai dan simbol baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kebiasaan atau tradisi adalah tata cara yang sudah dilaksanakan berulang-ulang. Kebiasaan itu telah dirasakan manfaatnya oleh para profesi sehingga menjadi norma atau nilai budaya. Nilai budaya profesi merupakan kepercayaan dasar, suatu premis yang pasti yang menjadi dasar berpikir dan berperilaku profesional.

## 9. Perilaku Profesional

Perilaku profesional didasarkan pada ilmu pengetahuan, kode etik serta budaya profesi. Faktor-faktor inilah yang membuat orang profesional bertingkah laku tertentu. Tingkah laku ini sering berlainan dengan tingkah laku orang awam atau anggota profesi lainnya.

Persepsi masyarakat mengenai perilaku profesi sering ditentukan bukan saja seberapa jauh kebutuhan mereka terlayani oleh profesional tapi juga ditentukan oleh perilaku profesional yang nampak dari luar atau biasanya disebut penampilan. Istilah penampilan antara lain terdiri dari cara berkomunikasi dengan klien cara berpakaian.

Pustakawan di Indonesia relatif masih lemah dalam kedua hal ini. Masyarakat juga sering menstereotip profesi pustakawan sebagai orang yang berkaca mata tebal, diam, tidak aktif dan tidak dinamis.

## 10. Standar

Standar berisi ketentuan-ketentuan, norma, teknis untuk melaksanakan layanan profesi. Standar merupakan tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur, menguji dan mengevaluasi hasil layanan profesi. Standar ini dilaksanakan secara konsisten.

Standar profesi meliputi semua aspek layanan profesi. Standar dalam profesi kepustakawanan, antara lain berupa standar layanan teknis, standar layanan pembaca, standar meubeler perpustakaan dan standar kartu katalog.

## 11. Klasifikasi Keprofesionalan

Pustakawan profesional dapat digolongkan berdasarkan pendidikan dan berdasarkan kepangkatan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, profesional dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Profesional spesialis, S3 bidang ilmu perpustakaan atau ilmu informasi.
- b. Profesional, S2 bidang ilmu perpustakaan atau ilmu informasi.
- c. Para-profesional, S1 & S0 bidang ilmu perpustakaan.

Klasifikasi kedua ialah berdasarkan kepangkatan. Klasifikasi ini didasarkan pada pendidikan, kepangkatan dan karier kerja dalam bidang perpustakaan. Contoh ini akan dibahas pada Modul 2 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.



### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang Anda ketahui tentang profesi, profesional dan profesionalisme?
- 2) Kalau menyimak perkembangan profesi, timbul tanda tanya apakah pustakawan dapat digolongkan kedalam profesi atau tidak?
- 3) Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab dan pengabdian. Jelaskan pernyataan tersebut!
- 4) Faktor-faktor apa saja yang melandasi perilaku profesional?
- 5) Sebagai profesional, orang yang melaksanakan profesinya harus mengikuti norma dan standar profesi. Mengapa demikian?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk menjawab soal-soal latihan di atas, dianjurkan Anda membaca kembali uraian tentang Profesi, Profesional dan Profesionalisme di atas, khususnya bagian-bagian yang belum Anda mengerti secara jelas.



## RANGKUMAN

---

Pustakawan adalah profesi yang ada dalam masyarakat. Profesi pustakawan, sama halnya dengan profesi-profesi lain membutuhkan profesionalisme dari individu-individu tersebut. Profesi ini terus berkembang seperti hanya profesi lain yang dianggap lebih bonafit. Semua hal yang berkaitan dengan syarat profesi telah dipenuhi oleh profesi pustakawan.

*Image* mengenai pustakawan sangat tergantung kepada individu-individu yang menjalankan profesi itu sendiri dan merekalah yang mampu mengubahnya. Semua terpulang pada para pemegang profesi ini, akan kita jadikan profesi ini sebagai profesi yang berkembang, jalan di tempat atau semakin tidak memiliki suara, hanya pustakawanlah yang mampu menjawabnya.



## TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Orang yang melaksanakan profesi sebagai seorang harus profesional mengikuti hal-hal bersifat ....
  - A. Peraturan pegawai negeri
  - B. Seleksi sesuai standar yang berlaku
  - C. Norma dan standar profesi
  - D. Standar kepangkatan dan skala gaji
  
- 2) Tiga watak kerja yang merupakan kegiatan pemberian “jasa profesi” ialah:
  - A. Mengharapkan gaji yang tinggi, bisa dikerjakan oleh siapa saja, dan tidak perlu kode etik
  - B. Tegaknya kehormatan profesi tidak terlalu mengharap upah materiil, dilandasi kompetensi, dan dikontrol kode etik profesi
  - C. Bekerja secara efektif dan efisien, bekerja atas dasar keterpanggilan, dan imbalan jasa tinggi
  - D. Harus menjadi pegawai negeri, berijazah tinggi, dan mau melayani siapa saja

- 3) Kinerja profesional adalah kinerja yang memerlukan syarat intelektual dan bukan melulu keterampilan hal ini berarti ....
- Keahlian dan keterampilan diperoleh dari pendidikan
  - Intelektualitas seseorang harus dilandasi keterampilan
  - Syarat intelektual lebih tinggi dari pada keterampilan
  - Kinerja merupakan totalitas kerja intelektual maupun keterampilan
- 4) Profesi (*profession*) berbeda dengan pekerjaan (*occupation*) sebab:
- profesi dapat dilakukan oleh siapa saja
  - sesungguhnya profesi sama dengan pekerjaan
  - profesi memerlukan keahlian dan keterampilan, memiliki organisasi profesi, berorientasi pada jasa, dan memiliki kode etik profesi
  - Profesi (*profession*) gajinya lebih tinggi dari pada pekerjaan (*occupation*)
- 5) Perilaku profesional seseorang ditentukan oleh:
- peluang kerja, jadwal kerja, dan skala gaji
  - kompetensi, Kode etik, dan budaya profesi
  - kompetensi, koneksi, dan skala gaji
  - kompetensi institusional, kompetensi personal, dan skala gaji

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Perpustakaan, Pustakawan dan Kepustakawanan

Perpustakaan tidak dapat dipahami sebatas sebagai sebuah gedung atau akomodasi fisik tempat menyimpan buku semata. Akan tetapi, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, "ruang khusus", dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaannya.

Penjelasan diatas merupakan pengertian yang umum dipahami oleh banyak orang pada saat ini. Namun, pengertian perpustakaan sesungguhnya telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan paradigma kepustakawanan yang tidak hanya dipahami sebagai suatu tempat, tetapi harus dipahami sebagai suatu sistem. Perpustakaan harus dipahami sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat unsur tempat (isntitusi), koleksi yang disusun berdasarkan sistem tertentu, dan pemakai.

Sementara itu, kepustakawanan atau dalam istilah asing dikenal dengan *librarianships* pada intinya adalah sebuah profesi, yaitu pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam istilah asing *librarianships* diartikan sebagai *a profession concerned with acquiring and organizing collections of books and related materials in libraries and servicing readers and others with these resources; the position or duties of a librarian*. Jadi, istilah kepustakawanan mengandung makna tingkatan keterampilan dalam kapasitas melakukan pekerjaan tertentu, yaitu dalam hal pengadaan koleksi, pengolahan, pendayagunaan, dan penyebaran informasi kepada pemakai.

Lynn menyatakan "*A Profession delivers esoteric services based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of client*". Suatu profesi menyajikan pelayanan yang hanya dilakukan oleh orang tertentu yang secara sistematis diformulakan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Dengan demikian, tidak semua pekerjaan disebut profesi dan tidak semua orang mampu melaksanakan suatu profesi. Dalam menerapkan aplikasi teknologi dibidang perpustakaan

diperlukan sumber daya manusia yang profesional dibidangnya, karena teknologi informasi akan sangat berperan dan akan menjadi tulang punggung karya dokumentasi maupun jasa informasi. Sehinggaantisipasi atas perkembangan teknologi informasi harus menjadi perhatian para pengelola informasi (Riah Wiratningsih, <http://riah.staff.uns.ac.id/2010/03/10/pustakawan-di-era-teknologi-informasi-dan-komunikasi-new-paradigm/11-05-2010>) Guna memberikan gambaran dimana seorang pustakawan menjalankan profesinya maka berikut ini akan dibahas pengertian, fungsi dan jenis-jenis perpustakaan.

## A. PENGERTIAN PERPUSTAKAAN

Ada berbagai pengertian perpustakaan yang telah dibicarakan dalam berbagai sumber, namun secara umum perpustakaan dapat didefinisikan sebagai suatu institusi yang didalamnya tercakup unsur koleksi (informasi), pengolahan, penyimpanan, dan pemakai. Pengertian perpustakaan saat ini bukan lagi sebuah gedung atau *objek keepers*, melainkan sebuah sumber pengetahuan (Mallinger, 2003). Untuk memahami perpustakaan secara menyeluruh bukan saja hanya dilihat dari gedung atau fisik tempat menyimpan buku semata, tetapi harus dipahami sebagai sebuah sistem secara utuh yang di dalamnya terdapat unsur tempat (institusi), koleksi yang disusun berdasarkan sistem tertentu pengelola dan pemakai.

Pengertian perpustakaan secara sederhana adalah suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, “ruang khusus”, dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan, sedangkan pengertian perpustakaan menurut Surat Keputusan dari Menpan No.18 Tahun 1988 adalah suatu unit kerja yang sekurang-kurangnya mempunyai koleksi 1.000 judul bahan pustaka atau 2.500 eksemplar dan dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang. Sementara itu, ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa: Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Membicarakan masalah perpustakaan tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai kata-kata yang berhubungan dengan kata perpustakaan. Berikut pengertian kata-kata yang berhubungan dengan perpustakaan sehingga

pustakawan maupun masyarakat umum akan lebih mudah untuk memahami sistem perpustakaan secara menyeluruh. Kata-kata yang berhubungan dengan perpustakaan adalah sebagai berikut.

1. Pustaka atau buku atau kitab, yaitu kumpulan atau bahan berisi hasil tulisan atau cetakan, dijilid menjadi satu agar mudah dibaca dan sedikitnya berjumlah 48 halaman. Dari kata *pustaka* terbentuk kata turunan, antara lain perpustakaan, pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan.
2. Perpustakaan, yaitu kumpulan buku atau bangunan fisik tempat buku dikumpulkan, disusun menurut sistem tertentu untuk kepentingan pemakai.
3. Pustakawan, yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal (di Indonesia kriteria pendidikan minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi).
4. Kepustakaan, yaitu bahan bacaan cetak maupun rekam yang digunakan untuk menyusun karangan makalah, artikel, laporan ilmiah, dan sejenisnya.
5. Ilmu Perpustakaan, yaitu ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan, sedang cakupannya meliputi hal-hal sebagai berikut.
  - a. Perpustakaan sebagai suatu institusi, mencakup organisasi perpustakaan, perkembangannya, peranannya dalam masyarakat, dan sumbangan perpustakaan pada umat manusia.
  - b. Organisasi koleksi perpustakaan, cara mengolah, menyimpan, dan sistem temu kembalinya (informasi).
  - c. Pengawetan/pelestarian koleksi perpustakaan.
  - d. Penyebaran informasi dan jasa perpustakaan lain untuk kepentingan masyarakat.
  - e. Hal-hal yang berkenaan dengan jasa perpustakaan, seperti berbagai layanan perpustakaan bagi pemakai/anggota.
6. Kepustakawanan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pustakawan, seperti profesi kepustakawanan dan penerapan ilmu, misalnya dalam hal pengadaan koleksi, pengolahan, pendayagunaan, dan penyebaran informasi kepada pemakai.

## **B. FUNGSI PERPUSTAKAAN**

Setiap perpustakaan diselenggarakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, ada perbedaan fungsi yang sifatnya lebih spesifik pada setiap jenis perpustakaan. Menurut beberapa sumber, pada umumnya perpustakaan mempunyai fungsi yang sama sebagai berikut.

### **1. Penyimpanan**

Perpustakaan bertugas menyimpan koleksi (informasi) yang diterimanya. Hal itu tampak sekali pada perpustakaan nasional yang ada pada setiap negara. Tidak semua bahan pustaka (koleksi yang mengandung informasi) harganya dapat terjangkau oleh masyarakat atau orang yang membutuhkan. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pembelian koleksi, yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang disebut Undang-undang Deposit. Di Indonesia telah dikeluarkan UU No.4 Tahun 1990 tentang Wajib Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Mekanisme pelaksanaan UU No.4 ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1991. Isi undang-undang ini, antara lain mewajibkan setiap penerbit, pencetak, dan produsen mengirimkan contoh terbitan, baik cetak maupun terekam kepada Perpustakaan Nasional dan/atau perpustakaan lain yang ditunjuk. Fungsi perpustakaan sebagai tempat penyimpanan bahan pustaka (koleksi) kurang tampak dominan karena pada perpustakaan itu (selain perpustakaan nasional) terdapat kebijakan penyiangan atau *weeding* (bahasa Inggris). Kebijakan itu, erat kaitannya dengan tujuan masing-masing perpustakaan. Pada Perpustakaan Nasional, penyiangan ini tidak dilakukan karena fungsi Perpustakaan Nasional ialah melestarikan khasanah bangsa, baik dalam bentuk terbitan tercetak maupun terekam.

### **2. Pendidikan**

Perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, lebih-lebih mereka yang sudah bekerja, telah meninggalkan bangku sekolah ataupun putus sekolah. Perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku, sedangkan buku selalu dihubungkan dengan kegiatan belajar. Oleh karena itu, perpustakaan selalu berhubungan dengan kegiatan belajar. Jika kegiatan belajar, meliputi belajar di dalam dan di luar sekolah, perpustakaan berkaitan dengan kedua hal tersebut. Pada sekolah terdapat perpustakaan untuk membantu proses

belajar mengajar, sedangkan di luar sekolah masih ada perpustakaan umum yang merupakan sarana pendidikan berkesinambungan seumur hidup.

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas, pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sedangkan, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pasal 4 menyatakan bahwa Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **3. Penelitian**

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai macam koleksi (informasi) untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemakai. Kegiatan penelitian itu dilakukan oleh para pemakai perpustakaan, mulai dari murid sekolah dasar sampai ke peneliti pemenang hadiah Nobel. Kedalaman dan cakupan pada setiap penelitian dapat berbeda meskipun topiknya sama, yakni bergantung pada tujuannya.

### **4. Informasi**

Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemustaka yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan. Informasi juga disediakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemakainya. Jawaban-jawaban tersebut, antara lain disediakan melalui bahan referensi/rujukan. Apabila perpustakaan dipandang sebagai sumber informasi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Menghimpun berbagai macam (sumber) informasi.
- b. Mengolah bermacam-macam (sumber) informasi berdasarkan sistem tertentu.
- c. Menyebarkan bermacam-macam (sumber) informasi kepada pemakai perpustakaan.
- d. Dalam hal tertentu, berfungsi sebagai tempat lahirnya informasi.
- e. Melestarikan berbagai macam (sumber) informasi.
- f. Memberikan informasi bagi masyarakat sekarang dan masyarakat yang akan datang.

## 5. Rekreasi Kultural

Perpustakaan berfungsi menyimpan khasanah budaya bangsa. Perpustakaan berperan meningkatkan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Fungsi kultural dilakukan dengan cara mengadakan pameran ceramah, pertunjukan kesenian, dan penyediaan bahan bacaan yang dapat menghibur bagi pemakai, tetapi sekaligus mempunyai nilai yang lain, seperti pendidikan dan seni.

Dengan perkembangan perpustakaan seperti saat ini, selain fungsi-fungsi di atas maka fungsi perpustakaan berkembang juga. Perkembangan fungsi perpustakaan seiring dengan perkembangan objek yang dikelola dari pengelolaan media informasi menjadi pengelola substansi atau isi informasi sehingga fungsi perpustakaan yang tadinya sebagai pengelolaan data berkembang menjadi pengelolaan informasi dan selanjutnya menjadi pengelolaan pengetahuan (Susanto, 2001).

### C. JENIS PERPUSTAKAAN

Pada hakikatnya semua jenis perpustakaan merupakan bagian dari sistem pendidikan dan informasi masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan bukan saja berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan kebutuhan informasi.

Dengan adanya berbagai jenis masyarakat yang harus dilayani oleh perpustakaan, serta sejarah, tujuan, anggota, organisasi, dan kegiatan yang berlainan maka timbullah berbagai jenis perpustakaan. Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya berbagai jenis perpustakaan, antara lain berikut ini.

1. Munculnya berbagai jenis media informasi, seperti media tercetak (buku, majalah, laporan, surat kabar) dan media grafis/elektronik, seperti film, foto, *microfilm*, dan video. Dengan adanya berbagai macam media ini menimbulkan berbagai persepsi bagi pustakawan, yang mengakibatkan timbulnya berbagai jenis perpustakaan.
2. Adanya keperluan informasi yang dibutuhkan berbagai jenis/kelompok pembaca. Dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok pembaca, misalnya anak bawah lima tahun, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, dan sejenisnya. Kebutuhan bahan bacaan mereka pun berbeda sehingga tumbuhlah perpustakaan yang mengkhususkan diri untuk kelompok pembaca tertentu.

3. Adanya berbagai spesialisasi subjek, termasuk ruang lingkup subjek serta perincian subjek yang bersangkutan. Dalam kenyataan sehari-hari, pembaca mempunyai minat serta keperluan informasi yang berbeda derajat kedalamannya walaupun subjeknya sama. Kebutuhan informasi mengenai suatu subjek yang berbeda-beda intensitas intelektualnya maka akan tumbuh berbagai jenis perpustakaan dengan koleksi yang sesuai dengan keperluan dan tingkat intelektualitas pembaca.
4. Adanya ledakan informasi, yakni pertumbuhan literatur yang cepat dan sangat banyak sehingga tidak memungkinkan sebuah perpustakaan memiliki semua terbitan yang ada. Disamping itu, pertumbuhan subjek ilmu pengetahuan yang artinya sering terjadi fusi berbagai subjek menjadi satu atau sebaliknya suatu subjek memunculkan subjek lain memunculkan berbagai perpustakaan yang mengkhususkan diri pada subjek tertentu.

Selain berbagai faktor tersebut ada juga beberapa aspek yang memengaruhi munculnya berbagai jenis perpustakaan. Aspek-aspek tersebut adalah berikut ini.

1. Tugas dan fungsi perpustakaan.
2. Pemakai atau pengguna perpustakaan.
3. Koleksi perpustakaan.

Jenis perpustakaan yang muncul dari berbagai aspek dan faktor tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Perpustakaan Nasional**

Sampai dengan dikeluarkannya UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan belum ada kesepakatan bersama mengenai definisi perpustakaan nasional, yang ada hanya kesepakatan mengenai fungsinya. Fungsi utama perpustakaan nasional ialah menyimpan semua bahan pustaka tercetak dan terekam yang diterbitkan di suatu negara. Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan utama dan paling komprehensif yang melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Definisi menurut UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI diresmikan tahun 1989, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1989. Menurut Keppres ini, Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Perpustakaan Nasional RI merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Perpustakaan Nasional RI mempunyai fungsi, sebagai berikut ini.

- a. Membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan mengenai pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan.
- b. Melaksanakan pengembangan tenaga perpustakaan dan kerja sama antara badan/lembaga termasuk perpustakaan didalam maupun diluar negeri.
- c. Melaksanakan pembinaan atas semua jenis perpustakaan, di instansi/lembaga Pemerintah ataupun swasta yang ada di Pusat dan daerah.
- d. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka terbitan dalam dan luar negeri.
- e. Melaksanakan jasa perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan pustaka.
- f. Melaksanakan penyusunan naskah bibliografi nasional dan katalog induk nasional.
- g. Melaksanakan penyusunan bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak bibliografi.
- h. Melaksanakan jasa koleksi rujukan dan naskah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Untuk lebih mendalami perkembangan Perpustakaan Nasional, khususnya di Indonesia akan dibicarakan pada kegiatan belajar tersendiri.

## **2. Perpustakaan Umum**

Perpustakaan Umum mempunyai tugas melayani masyarakat umum atau semua anggota lapisan masyarakat yang memerlukan jasa perpustakaan dan

informasi. Ciri-ciri perpustakaan umum adalah terbuka untuk umum, dibiayai oleh dana umum, dan jasa yang diberikan pada hakikatnya bersifat cuma-cuma.

Perpustakaan amat penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa karena perpustakaan umum merupakan gerbang menuju pengetahuan, mendukung perorangan, dan kelompok untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri dan pembangunan budaya (Blasius, 2002). Demikian pentingnya peranan perpustakaan umum bagi kecerdasan bangsa sehingga Unesco mengeluarkan manifesto perpustakaan umum pada tahun 1972. Adapun *Manifesto Perpustakaan Umum Unesco*, (Sulistyo-Basuki, 1991) menyatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai 4 tujuan utama sebagai berikut.

- a. Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka kearah kehidupan yang lebih baik.
- b. Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna dan sedang hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat (informasi mutakhir).
- c. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, bantuan yang diberikan adalah dengan menyediakan bahan pustaka yang sesuai. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pendidikan perpustakaan umum, lebih tepat disebut sebagai pendidikan berkesinambungan ataupun pendidikan seumur hidup. Pendidikan sejenis ini hanya dapat dilakukan oleh perpustakaan umum karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya pranata kepustakawanan yang terbuka bagi umum. Perpustakaan nasional juga terbuka untuk umum, namun untuk memanfaatkannya tidak selalu terbuka langsung bagi perorangan, adakalanya harus melalui perpustakaan lain.
- d. Bertindak selaku agen kultural, artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya dengan cara menyelenggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film, dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan seikutsertaan, kegemaran dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya.

Selain beberapa tujuan yang harus dicapai seperti tersebut di atas, Perpustakaan Umum juga mempunyai misi agar tidak ditinggalkan oleh anggotanya. Menurut Blasius (2002) misi Perpustakaan Umum adalah berikut ini.

- a. Menciptakan dan menguatkan kebiasaan membaca sejak dini.
- b. Mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan perorangan yang belajar mandiri.
- c. Memberikan peluang bagi pengembangan kreativitas.
- d. Merangsang imajinasi dan kreativitas kaum muda.
- e. Mempromosikan warisan budaya, penemuan ilmiah, dan inovasi.
- f. Menyediakan akses pada ekspresi budaya.
- g. Membina dialog antarbudaya dan mendukung keanekaragaman budaya.
- h. Membantu budaya lisan.
- i. Menjamin akses atas semua jenis informasi ke masyarakat bagi semua warga.
- j. Menyediakan cukup informasi bagi perusahaan, asosiasi, dan kelompok pemerhati setempat.
- k. Memberikan kemudahan dalam pengembangan keterampilan dan ketidakbutaan informasi dan komputer.
- l. Membantu dan aktif dalam kegiatan pemberantasan buta huruf pada semua tingkatan.

Perpustakaan Umum di Indonesia banyak didirikan di Daerah Tingkat II (kabupaten), kecamatan, dan desa. Perpustakaan rumah ibadah dapat dikelompokkan pula sebagai perpustakaan umum karena tugas dan fungsinya pada hakikatnya adalah melayani umum sesuai dengan agama yang dianut masyarakat setempat. Dilihat dari koleksinya, perpustakaan umum dan perpustakaan rumah ibadah adalah menghimpun berbagai jenis bahan pustaka yang telah melewati proses seleksi terlebih dulu agar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan informasi masyarakat pemakai yang dilayani.

Departemen yang bertanggung jawab pada pendirian dan pengelolaan perpustakaan umum adalah Departemen Dalam Negeri dan jajarannya di daerah, sedangkan untuk perpustakaan rumah ibadah adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab jajaran Departemen Agama. Dalam hal pembinaan, perpustakaan umum dan perpustakaan rumah ibadah adalah menjadi tugas Perpustakaan Nasional RI.

Lebih jelasnya, sesuai amanat UU RI No. 43 tahun 2007 dinyatakan bahwa Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat,

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

### 3. Perpustakaan Sekolah

Di Indonesia dasar pembentukan perpustakaan sekolah adalah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus menyediakan sumber belajar (perpustakaan). Perpustakaan merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang kehadirannya hanya dapat dibenarkan jika mampu membantu pencapaian pengembangan tujuan-tujuan sekolah yang bersangkutan. Penekanan tujuan keberadaan perpustakaan sekolah adalah pada aspek edukatif dan rekreatif (*cultural*).

Keberadaan perpustakaan sekolah sampai pada saat ini kondisinya masih memprihatinkan, bukan saja pada segi fisiknya (gedung atau ruangan), tetapi juga dari segi sistem pengelolaan, sumber daya manusia, koleksi, dan alat/perlengkapan fisik yang lain. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Bidang Perpustakaan Sekolah, Pusat Pembinaan Perpustakaan Diknas terhadap keberadaan perpustakaan sekolah, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Banyak sekolah yang belum menyelenggarakan perpustakaan.
- b. Perpustakaan sekolah yang ada kebanyakan belum menyelenggarakan layanan secara baik, kurang membantu proses belajar mengajar dan sering berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku belaka.

- c. Ada sejumlah kecil perpustakaan sekolah yang kondisinya cukup baik, tetapi belum terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar.
- d. Keberadaan dan kegiatan perpustakaan sekolah sangat tergantung dari sikap kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam segala hal.
- e. Kebanyakan perpustakaan sekolah tidak memiliki pustakawan (tenaga pengelola tetap), sering hanya dikelola oleh seorang guru yang setiap saat dapat dimutasikan.
- f. Pekerjaan di perpustakaan dianggap kurang terhormat sehingga kurang disukai, bahkan dianggap sebagai pekerja kelas dua. Oleh karena itu, ada perpustakaan yang pengelolanya diserahkan kepada petugas tata usaha sebagai tugas sampingan.
- g. Koleksi perpustakaan sekolah umumnya tidak bermutu dan belum terarah sesuai dengan tujuannya.
- h. Layanan perpustakaan sekolah belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya SDM yang terdidik dalam bidang perpustakaan.
- i. Dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sangat terbatas.
- j. Banyak sekolah tidak mempunyai ruangan khusus untuk perpustakaan.

Dilihat dari aspek koleksinya, banyak perpustakaan sekolah yang hanya memiliki buku paket bidang studi yang merupakan buku ajar atau buku teks yang dipakai dalam pengajaran. Koleksi lain yang berorientasi pada aspek rekreatif (*cultural*) sangat kurang, bahkan sering tidak ada. Padahal, koleksi penunjang, seperti buku-buku fiksi sangat penting, khususnya untuk meningkatkan daya imajinasi dan menumbuhkan motivasi membaca. Disamping itu, koleksi penunjang tersebut sangat penting untuk pengembangan aspek peserta didik.

Ironisnya lagi, ada sementara pendapat dari kalangan pendidik (guru) yang masih berpegang bahwa tanpa perpustakaan sekolah, proses belajar dan mengajar berjalan lancar. Mereka kurang berupaya agar anak didik mempunyai kebiasaan membaca sehingga dapat memperlancar dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Banyak dikalangan guru yang hanya mengejar aspek nilai yang bersifat normatif pada setiap bidang studi yang diajarkan. Jika hal-hal seperti itu dipertahankan, jaminan peningkatan hasil dari pendidikan dikalangan sekolah sulit diharapkan.

Perpustakaan sekolah tidak boleh menyimpang dari tugas dan tujuan sekolah sebagai lembaga induknya. Beberapa fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan sekolah berfungsi membantu program pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan yang terdapat didalam kurikulum. Mengembangkan kemampuan anak menggunakan sumber informasi. Bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat untuk membantu guru mengajar dan tempat bagi guru untuk memperkaya pengetahuan.
- b. Membantu peserta didik memperjelas dan memperluas pengetahuan pada setiap bidang studi. Keberadaan dan tujuan perpustakaan sekolah harus terintegrasi dengan seluruh kegiatan belajar dan mengajar. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium ringan yang sesuai dengan tujuan yang terdapat didalam kurikulum.
- c. Mengembangkan minat dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan belajar mandiri.
- d. Membantu anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya.
- e. Membiasakan anak untuk mencari informasi di perpustakaan. Kemahiran anak mencari informasi di perpustakaan akan menolong untuk belajar mandiri dan memperlancar dalam mengikuti pelajaran selanjutnya.
- f. Perpustakaan sekolah merupakan tempat memperoleh bahan rekreasi sehat melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur tingkat kecerdasan anak.
- g. Perpustakaan sekolah memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik.

Amanat UU RI No. 43 tahun 2007 Bagian Ketiga tentang Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyatakan:

- a. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- c. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- d. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

#### 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain, turut melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat, serta melayangkan sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. Kelima tugas tersebut dilaksanakan dengan tata cara, administrasi, dan organisasi yang berlaku bagi penyelenggaraan sebuah perpustakaan. Perguruan tinggi (PT) di sini meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan perguruan tinggi lain yang sederajat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dimuat ketentuan mengenai perpustakaan, pada Pasal 27 butir 7 angka 10, Pasal 34 ayat (2); Pasal 55 ayat (1); Pasal 69 ayat (1); Pasal 82 ayat (1); dan Pasal 95 ayat (1), yang pada dasarnya menyatakan bahwa perpustakaan adalah unsur penunjang yang perlu ada pada semua bentuk perguruan tinggi, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik maupun akademi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Dilihat dari konsep manajemen maka perpustakaan Perguruan tinggi sebagian besar memiliki hal-hal berikut ini.

- a. Misi (*mission*).
- b. Sasaran (*goals*).
- c. Tujuan (*objectives*).
- d. Kegiatan (*activities*).
- e. Program (*programmed*).

Misi perpustakaan perguruan tinggi lazimnya sesuai dengan misi perguruan tinggi induknya yang dicantumkan dalam statuta. Bilamana misi

perpustakaan tidak dinyatakan secara jelas maka misi perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya ialah pendidikan, penelitian, dan informasi. Apabila dilihat dari dasar filosofisnya maka misi perpustakaan perguruan tinggi adalah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini, kemudian dijabarkan menjadi sasaran, antara lain berikut ini.

- a. Organisasi dan administrasi yang baik.
- b. Dana yang cukup.
- c. Pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Jasa yang baik.
- e. Fasilitas fisik yang memadai.

Tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah berikut ini.

- a. Memenuhi keperluan informasi pengajar dan mahasiswa.
- b. Menyediakan bahan pustaka rujukan pada semua tingkat akademis.
- c. Menyediakan ruangan untuk pemakai.
- d. Menyediakan jasa peminjaman serta menyediakan jasa informasi aktif bagi pemakai.

Dapat pula dikatakan tugas perpustakaan perguruan tinggi ialah berikut ini.

- a. Pemilihan dan pengadaan.
- b. Pengolahan bahan pustaka.
- c. Pelayanan.
- d. Tata usaha.

Tujuan khusus ini berhubungan dengan setiap sasaran. Kegiatan perpustakaan perguruan tinggi menyangkut jasa yang diberikan, tenaga yang diperlukan, sumber keuangan, dan dari sini baru dikembangkan berbagai program perpustakaan.

Berbagai usaha pembinaan perpustakaan perguruan tinggi telah dilakukan di Indonesia. Pembinaan perpustakaan Perguruan tinggi mulai dilakukan dengan lebih sistematis sejak awal orde baru, dengan memanfaatkan kerja sama luar negeri, termasuk *The British Council*, *The Asia Foundation*, *USAID*, *Ford Foundation*, *NUFFIC*, dan sebagainya. Di sisi lain, mulai Pelita I telah pula disediakan dana pembangunan untuk pengadaan buku-buku perpustakaan perguruan tinggi negeri. Selama 5 tahun, Perpustakaan ITB telah dibina oleh *The British Council* melalui penempatan

perpustakaan ahli dari Inggris sebagai Kepala Perpustakaan pada awal tahun 1970-an, serta beberapa *volunteers* dari Inggris. Pada tahun 1993 koleksi perpustakaan *British Council* yang ada di Bandung dihibahkan pada Perpustakaan ITB. *The Asia Foundation* telah menyumbangkan ribuan judul kepada berbagai perpustakaan perguruan tinggi, terutama pada tahun 1970-an.

Dalam dana pinjaman Bank Dunia tahun 1988 untuk pendidikan tinggi (7085-IND), telah disusun pengembangan *National Higher Education Library Network*. Dalam program ini, perpustakaan pada 8 perguruan tinggi (UI, IPB, ITB, Universitas Pendidikan Indonesia, UGM, ISI-Yogyakarta, ITS dan UNAIR) ditunjuk sebagai Pusat Pelayanan Disiplin Ilmu (Pusyandi) yang mengembangkan koleksi serta memberikan layanan dan sarana untuk 12 bidang ilmu, seperti kedokteran, teknologi, pertanian, kelautan, MIPA, ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan ekonomi. Masing-masing Pusyandi dikembangkan untuk mampu memberikan pelayanan kepustakaan maupun informasi lainnya, sedangkan dalam bidang ilmu tertentu diserahkan pada perguruan tinggi lain. Kemampuan ini diwujudkan dalam pengembangan, penyimpanan, pencarian, dan pengiriman data, informasi maupun dokumen diantara anggota jaringan yang dihubungkan dengan sistem UNINET yang juga dikembangkan dengan dana pinjaman ini. Jaringan ini menghubungkan 43 perguruan tinggi negeri melalui pusat komputer masing-masing, yang dihubungkan pula dengan perpustakaan. Dalam program ini juga dikembangkan *University Library Technology Centre* di Universitas Indonesia, yang melakukan pengembangan, pelatihan, pemodelan, dan memberikan konsultasi dalam pemanfaatan teknologi untuk perpustakaan, terutama melibatkan penggunaan komputer dan sarana komunikasi. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, juga dilakukan pengadaan 22.500 judul buku impor, berlangganan 750 judul jurnal ilmiah, dan upaya penerjemahan buku untuk 120 judul.

Program yang dikembangkan dalam waktu 3 tahun tersebut telah dapat mencapai sebagian besar dari sasaran fisiknya, namun biaya operasi penggunaannya pada waktu itu (1991) masih sangat mahal maka pengguna jaringan komunikasi tersebut sangat sedikit.

Upaya mengembangkan ini dilanjutkan dengan dana pinjaman Bank Dunia tahun 1991 (311-IND). Dalam program ini koleksi buku dan jurnal ilmiah terus dikembangkan, disamping meningkatkan penggunaan CD-ROM untuk seluruh perpustakaan perguruan tinggi. Dalam program ini dilakukan

pendidikan di luar negeri untuk 30 orang program S2 dan 30 orang pelatihan singkat, serta pendidikan dalam negeri untuk 60 orang program S1, 30 orang program S2, dan 60 orang program Diploma II. Disamping itu, dilakukan juga pelatihan penggunaan komputer untuk perpustakaan pada 60 orang.

Dalam dana-dana pinjaman tersebut pengembangan perguruan tinggi swasta lebih dipusatkan pada pengembangan sarana laboratorium bersama maupun pembinaan dosen. Namun demikian, pelayanan dari Pusyandi tersebut terbuka bagi semua perguruan tinggi dengan prosedur kerja sama yang sederhana.

Dalam UU RI No. 43 tahun 2007 Bagian Keempat tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa.

- a. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Perpustakaan.
- b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

## **5. Perpustakaan Khusus**

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi pada subjek-subjek khusus. Adapun ciri-ciri perpustakaan khusus diantaranya berikut ini.

- a. Memberi informasi pada badan induknya, dimana perpustakaan itu berada.
- b. Tempatnya di gedung-gedung pusat penelitian, asuransi, agen-agen dan badan usaha yang mengarah ke kegiatan bisnis.
- c. Melayani pemakai khusus pada organisasi induknya.
- d. Cakupan subjeknya terbatas (khusus).
- e. Ukuran perpustakaanannya relatif kecil.
- f. Jumlah koleksinya relatif kecil.

Biasanya perpustakaan khusus berfungsi juga sebagai pusat informasi, yaitu memiliki hal-hal berikut ini.

- a. Informasinya luas, baik yang standar maupun yang tidak standar.
- b. Pengawasannya lebih mudah dalam bidang subjeknya serta lebih efisien.
- c. Peranannya lebih besar dalam laporan usaha penerbitan untuk review dan penelitian.
- d. Terdapat spesialisasi subjek.
- e. Teknik pelayanannya mengembangkan teknologi dan dokumentasi dengan komputer.
- f. Merupakan pusat yang bertanggung jawab pada semua jasa informasi sistem maupun subsistem.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perpustakaan khusus diantaranya berdasarkan kebutuhan jasa informasi dan kemampuan pemenuhan kebutuhan jasa informasi yang dihasilkan. Adapun jenis-jenis jasa yang dikerjakan perpustakaan khusus bervariasi tergantung dari organisasinya, selain itu tergantung juga pada dana, staf pelaksana, peralatan, serta tempat yang digunakan untuk perpustakaan. Kegiatan penting yang dilaksanakan dalam perpustakaan khusus untuk menunjang terlaksananya jasa yang ditawarkan, antara lain berikut ini.

- a. Pengadaan. Sumber untuk pengadaan bahan pustaka adalah bahan yang telah dimiliki atau dihasilkan oleh organisasi induknya dan materi baru dengan cara membeli, hadiah/tukar-menukar.
- b. Organisasi bahan pustaka. Setelah publikasi diadakan dan diseleksi oleh perpustakaan. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu penentuan sistem simpan dan temu kembali informasi. Dokumen disusun dalam urutan pengorganisasian yang dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dicari/ditemukan kembali dengan cepat dan tepat.
- c. Pemrosesan (pengolahan) informasi dan materi. Hal ini meliputi kegiatan identifikasi dan catatan kepemilikan, penyusunan koleksi sesuai bahan pustaka dan isi/subjek dokumen dengan melakukan analisis subjek dan klasifikasi untuk pengkatalogan subjek, serta pengindeksan, yaitu menyiapkan pangkalan data yang berisi rujukan topik-topik, nama dan halaman penunjuk, dimana topik itu dimuat pada buku atau terbitan berseri, laporan, kertas kerja maupun jenis pustaka yang lain.
- d. Diseminasi informasi dan jasa pemakai. Fungsi informasi suatu perpustakaan khusus merupakan ciri utama yang membedakan

perpustakaan khusus dengan perpustakaan yang lain. Usaha utama perpustakaan dan pustakawan perpustakaan khusus adalah menyediakan informasi dengan cepat dan mudah kepada staf di sebuah organisasi, dimana perpustakaan tersebut bernaung, dan memberi jawaban pertanyaan khusus (spesifik). Kebutuhan informasi untuk staf/karyawan berkisar pada kebutuhan untuk pengembangan organisasi dan kariernya serta hal-hal yang tidak dikenalnya. Nilai sebuah perpustakaan khusus pustakawannya terletak pada nilai kepuasan dalam melayani kebutuhan informasi bagi pemakai.

Didalam UU RI No. 43 tahun 2007 Bagian Kelima tentang Perpustakaan Khusus menyatakan bahwa.

- a. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- b. Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- c. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

## **D. SEJARAH PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI INDONESIA**

Sejarah perpustakaan diawali dengan ditemukannya tulisan, bahan tulis, serta alat tulis. Peninggalan berupa tulisan dimulai sejak adanya peradaban. Kapan perpustakaan mulai berdiri tidak pernah diketahui dengan pasti. Namun, berdasarkan penelitian arkeologis, perpustakaan telah dikenal sejak peradaban *Sumeria* sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan tersebut segera ditiru negara tetangganya, seperti *Babylonia*. Pada waktu itu, orang-orang purba menggunakan bahan tulis berupa tanah liat.

Kerajaan *Pergamun* berusaha mengembangkan perpustakaan, sebagaimana raja-raja Mesir. Pada waktu itu, belum ditemukan mesin cetak sehingga pembuatan naskah dilakukan dengan cara menyalin. Usaha

menyalin naskah dikembangkan oleh Kerajaan *Pergamun* dengan menggunakan bahan tulis berupa *papyrus*. Untuk mencegah agar perpustakaan *Pergamun* tidak menjadi saingan perpustakaan *Iskandaria* yang berada di Mesir maka Mesir menghentikan ekspor papyrus ke *Pergamun*. Guna menggantikan *papyrus*, *Pergamun* mengembangkan bahan tulis berupa, kulit binatang yang dikeringkan. Kulit yang digunakan terbuat dari kulit domba, sapi, disebut *parchment*. *Parchment* yang baik disebut *vellum* yang merupakan bahan tulis sampai abad pertengahan.

Kegiatan menyalin naskah ini dilakukan pula di pertapaan, sampai pertapaan menyediakan tempat khusus untuk menulis dan menyalin naskah disebut *scriptorium*. Pertapaan bahkan mengembangkan naskah yang dihiasi dengan gambar miniatur, menggunakan huruf indah disertai dengan warna merah, biru, dan emas. Lukisan pada naskah kuno dengan hiasan dan warna-warni itu disebut *iluminasi*.

Orang-orang Eropa menemukan mesin cetak sekitar abad ke-15. Pada awal penemuan mesin cetak, buku dicetak dengan teknik percetakan sederhana, dan dicetak antara tahun 1450-1500 yang disebut *incunabula* serta merupakan buku langka yang banyak dicari orang (Sulistyo-Basuki, 1993).

Pada perkembangan selanjutnya, perpustakaan juga merupakan pranata sosial. Oleh karena itu, perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial (masyarakat). Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadang-kadang dalam sejarah negara. Dengan demikian, sejarah perpustakaan disebuah lingkungan masyarakat, misalnya Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia.

## **1. Perkembangan Perpustakaan di Indonesia sampai dengan Kemerdekaan**

Sampai sekarang pustakawan maupun sejarawan Indonesia belum mengetahui dengan pasti kapan perpustakaan pertama kali berdiri di Indonesia. Mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran perpustakaan ditandai dengan dikenalnya tulisan. Jika pendapat ini benar maka sejarah perpustakaan di Indonesia harus dimulai sekitar tahun 400-an, saat lingga berupa batu dengan tulisan tentang raja Kutai, tetapi saat orang mengenal tulisan tidaklah sama dengan saat pembentukan perpustakaan. Tulisan pada lingga tersebut tidak dihimpun dalam satu kumpulan sebagaimana layaknya sebuah perpustakaan maka anggapan bahwa Indonesia telah mengenal perpustakaan sejak zaman Kutai tidak dapat diterima.

Pada periode awal kerajaan lokal kita mengetahui dari berbagai sumber, misalnya prasasti yang ditemukan diberbagai tempat di Indonesia maupun dari pemberitahuan musafir asing, misalnya, pada masa Kerajaan Tarumanegara banyak dijumpai kaum Brahmana yang mungkin menyimpan buku keagamaan yang ditulis pada *manuscript* di kediaman pendeta dan tidak digunakan untuk umum sehingga belum memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah perpustakaan.

Musafir It-tsing dari Cina menyatakan bahwa sekitar tahun 695 M di Ibu Kota Kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1.000 orang biksu. Disamping tugas keagamaan, biksu ini bertugas mempelajari agama Buddha melalui berbagai buku dengan asumsi sudah ada perpustakaan. It-tsing tidak memberitahukan bagaimana naskah itu disusun di biara dan digunakan oleh umum sehingga pendapat bahwa di Sriwijaya telah ada perpustakaan berdasarkan analogi dari pada penelitian.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul berbagai Kerajaan di pulau Jawa, misalnya Kerajaan Mataram yang mula-mula berpusat di Jawa tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur. Pada saat itu mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra, seperti *Sang Hyang Kamahayanikan*, *Brahmandapurana*, *Agastyparwa*, dan *Arjunawiwaha*. Dari bukti tersebut, nyatalah bahwa sudah ada naskah tulisan tangan dengan media daun lontar, namun hal itu tidak berarti bahwa telah ada perpustakaan. Seandainya sudah ada kumpulan *manuscript* maka *manuscript* tersebut hanya boleh digunakan oleh kalangan terbatas, misalnya raja beserta keluarganya saja. Menyusul zaman Kediri dengan peninggalan karya sastranya *Bharatayudha*, *Hariwangsa*, *Gatotkacasraya*, *Smaradahana*, *Sumanasantaka*, dan *Kresnayana*. Pada zaman Kediri disusul dengan berdirinya kerajaan Singosari dengan peninggalan naskah tertulis terkenal, yaitu *Pararaton*. Pada zaman Majapahit ditulis berbagai naskah, misalnya *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca, *Sutasoma* karya Mpu Tantular. Karya-karya yang lain tercatat *Kidung Harsawijaya*, *Kidung Ranggalawe*, *Sorantaka*, dan *Sundayana*.

Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara, misalnya, zaman Kerajaan Demak, Banten, Mataram, *Kasunanan* (Surakarta), *Mangkunegaran*, *Pakualaman*, *Kasultanan* (Yogyakarta), Cirebon, Melayu, Jambi, *Mempawah Makassar*, Maluku, dan Sumbawa. Tradisi budaya Indonesia yang lebih

mementingkan budaya lisan dari pada budaya tulisan menyulitkan penelitian mengenai perpustakaan pada zaman purba.

Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan yang paling awal berdiri terjadi pada masa Hindia Belanda atau VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Perpustakaan tertua yang didirikan Belanda adalah perpustakaan sebuah gereja di Batavia (kini Jakarta yang dirintis sejak tahun 1624). Buku-buku dipinjamkan pula bagi perawat rumah sakit di Batavia bahkan peminjaman diperluas sampai ke Semarang. Jadi, boleh dikatakan bahwa pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan. Kemudian, kegiatan perpustakaan gereja ini tak terdengar lagi. Baru seratus tahun kemudian, di Batavia berdiri perpustakaan khusus dibawah lembaga *Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) pada tanggal 24 April 1778 atas prakarsa Mr. J.C.M. Rademaker, ketua Raad van Indie (Dewan Hindia Belanda).

Sesudah pembangunan perpustakaan BGKW, berdirilah perpustakaan khusus lainnya, seiring dengan berdirinya berbagai lembaga penelitian maupun lembaga pemerintahan lainnya. Ketika pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis untuk membalas “utang” kepada rakyat Indonesia, salah satu kegiatan politik etis adalah pembangunan sekolah rakyat. Dalam bidang perpustakaan sekolah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Volksbibliotheek* berarti perpustakaan yang didirikan oleh *Volkslectuur* (kelak menjadi Balai Pustaka), sedangkan pengelolannya diserahkan kepada *Volkschool* (sekolah rakyat yang menerima tamatan sekolah rendah tingkat dua). Perpustakaan tersebut melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat.

Sebenarnya, sebelum pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Volksbibliotheek* pihak swasta telah terlebih dahulu mendirikan semacam perpustakaan atau ruang baca yang terbuka bagi umum. Jadi, mirip perpustakaan umum, seperti yang ada sekarang. Perpustakaan tersebut dinamakan *Openbareleezalen* atau secara harfiah ruang baca umum terbuka atau ruang baca umum, yang didirikan pada tahun 1910. Ruang baca tersebut menyediakan bacaan secara cuma-cuma, hanya dapat dibaca setempat, tidak boleh dipinjam, terbuka pagi sampai siang hari. *Openbare leezalen* didirikan oleh pihak swasta, seperti gereja *Katolik*, *Loge der Vrijmestselaren*, *Theosofische Vereeniging dan Matschappij tot Nut van het Algemeen*.

Kalau semula pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rendah maka awal tahun 1920-an ditandai berdirinya berbagai sekolah tinggi.

Misalnya, didirikan *Geneeskunde Hoogeschool* (Jakarta, 1927), kemudian di Surabaya dengan STOVIA, *Technische Hoogeschool* (Bandung, 1920), *Faculteit van Landbouwwen tenschap (er Wijsgebeerte Buitenzorg*, 1941), *Rechtshoogeschool* (Batavia, 1924) dan *Faculteit van Letterkunde* (Batavia, 1940). Setiap sekolah tinggi atau fakultas mempunyai perpustakaan yang terpisah satu sama lain.

Pada zaman Hindia Belanda juga berkembang sejenis perpustakaan komersial, dikenal dengan nama *Huurbibliotheek* atau perpustakaan sewa. Kalau *Volksbibliotheek* lebih banyak menyediakan bahan bacaan ilmiah populer maka pada perpustakaan sewa umumnya lebih banyak menyediakan bahan bacaan berupa roman dalam bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan bacaan remaja.

Berbeda dengan keadaan zaman Hindia Belanda maka sumber mengenai situasi perpustakaan zaman Jepang hampir tidak ada. Pemerintah pendudukan Jepang (1942-1945) mengeluarkan peraturan melarang penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Belanda, Inggris, Prancis, untuk digunakan di sekolah. Akibat larangan ini maka perpustakaan fakultas yang ada praktis tidak dapat digunakan karena sebagian besar buku dicetak dalam bahasa Belanda.

Selama masa pendudukan Belanda, pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dipegang oleh orang Belanda, sedangkan tenaga Indonesia sendiri belum pernah memperoleh pendidikan kepustakawanan. Akibat perang, semua orang Belanda termasuk pustakawan Belanda dimasukkan ketahanan militer sehingga perpustakaan tidak ada yang mengelola, bahkan koleksinya pun tidak menunjang karena sebagian besar dilarang oleh pemerintah Jepang sehingga lenyaplah *Volkbibliotheek*, dan *Huurbibliotheek*. Selain itu, koleksi perpustakaan fakultas, dan khusus praktis tidak digunakan karena pelarangan buku berbahasa Belanda serta suasana yang berorientasi pada memenangkan peperangan, yang masih utuh ketika Jepang menyerah pada tahun 1945 hanyalah koleksi perpustakaan *Bataviaasche Genotschap en Wetenschap*, dan beberapa perpustakaan khusus.

## **2. Perkembangan Perpustakaan di Indonesia setelah Kemerdekaan (1945 -2013)**

Sesudah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Pemerintah RI mendirikan *Perpoestakaan Negara Repoebliek Indonesia* di Yogyakarta pada tahun 1948. Perpustakaan Negara

ini merupakan perpustakaan negara pertama di Indonesia. Kegiatan perpustakaan tidak sempat berkembang akibat peperangan. Di Jakarta sendiri, beberapa pustakawan masih aktif dalam diskusi masalah kepustakawanan, bahkan sempat mendirikan *Study Club* artinya klub yang membahas suatu masalah. Baru sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia mulai membangun perpustakaan.

Para pendiri Republik meninggalkan amanat kepada bangsa bahwa salah satu kewajiban negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan amanat tersebut pemerintah sejak selesainya perjuangan fisik, mulai mengembangkan secara besar-besaran program pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam rangka usaha untuk memberi yang sama kesempatan untuk yang sama memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat dan sekaligus untuk mendidik bangsa agar dapat belajar mandiri sepanjang hayat, sejak tahun lima puluhan mulai diusahakan berdirinya perpustakaan.

Pada tahun 1950 berdiri Yayasan Hatta, antara lain bertugas untuk menyelenggarakan dan membina perpustakaan. Usaha pertama yang dilakukan adalah mendirikan Perpustakaan Yayasan Hatta di Yogyakarta yang masih ada sampai saat ini.

Pada tahun 1952, diresmikan berdirinya Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Indonesia, yang merupakan perubahan dari *Stichting voor Culturele Samenwerking* (Badan Kerja sama Kebudayaan Indonesia-Belanda). Perpustakaan ini dibuka untuk umum sejak awal 1953 dan nantinya diintegrasikan kedalam Perpustakaan Nasional RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat Nomor 0244/Sek/3/53, Tahun 1953 diselenggarakan Perpustakaan Rakyat, yang ditujukan untuk keperluan rakyat, dikenal dengan nama Taman Pustaka Rakyat (TPR). Pembangunan TPR disesuaikan dengan tingkat pemerintahan. Untuk desa didirikan Taman Pustaka Rakyat C dengan komposisi 40% bacaan tingkat SD dan 60% tingkat SMP. Pada tingkat kabupaten didirikan TPR B dengan komposisi 40% bacaan setingkat SMP dan 60% setingkat SMA. Pada ibu kota provinsi didirikan TPR A dengan komposisi koleksi 40% tingkat SMA dan 60% tingkat perguruan tinggi. Taman Pustaka Rakyat dikelola oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada saat bersamaan Kementerian Penerangan juga mendirikan Balai Bacaan Rakyat, isinya kebanyakan terbitan pemerintah terutama Departemen Penerangan. Pembangunan TPR sebagai perpustakaan

umum berjalan dengan cepat. Dalam kurun waktu singkat berhasil dibangun TPR-A, TPR-B, dan TPR-C. Semua koleksi dan gaji pegawai ditanggung oleh Kementerian PP&K.

Sebagai kelanjutan pembangunan perpustakaan, pemerintah juga mendirikan Perpustakaan Negara, diatur dalam Surat Keputusan Menteri PP&K No.29103 tanggal 23 Mei 1956. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa Perpustakaan Negara berfungsi sebagai perpustakaan umum serta mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu perkembangan perpustakaan lain dan menciptakan serta menyelenggarakan kerja sama antara perpustakaan.
- b. Berusaha menambah produksi mengenai *literature* fungsional.
- c. Menyelenggarakan *book-mobile unit*.
- d. Menyelenggarakan pendidikan berupa kursus perpustakaan, berusaha mengadakan katalog induk.
- e. Merupakan perpustakaan referensi untuk tingkat provinsi.

Untuk keperluan pencatatan hasil karya cetak nasional bagi keperluan riset dan informasi dengan SK Menteri PP dan K, Nomor 46860/Kab/1952, dibentuk Kantor Bibliografi Nasional, semula berkedudukan di Bandung, kemudian dipindah ke Jakarta. Dalam sejarah, Kantor Bibliografi Nasional pernah berstatus sebagai salah satu bidang pada Pusat Pembinaan Perpustakaan, sebelum diintegrasikan dalam Perpustakaan Nasional.

Dalam kurun waktu 1953-1956 Pemerintah mendirikan 19 Perpustakaan Negara, di tiap ibu kota provinsi. Perpustakaan Negara yang tertua adalah Perpustakaan Negara Yogyakarta, selanjutnya Padang, dan kemudian Ambon. Sebagai kelanjutan dari reorganisasi dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 095/0/1979 ke-19 Perpustakaan Negara dialihkan menjadi Perpustakaan Wilayah. Perpustakaan Wilayah sedia dialihkan menjadi unit pelaksana teknis Pusat Pembinaan Perpustakaan di tiap provinsi. Kepada Perpustakaan Wilayah juga dilimpahkan tugas untuk membina perpustakaan-perpustakaan diwilayahnya. Jumlah Perpustakaan Wilayah ditingkatkan menjadi 26 buah.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional, ke-26 Perpustakaan Wilayah dilebur sebagai satuan organisasi dilingkungan Perpustakaan Nasional yang berada di daerah diberi nama Perpusda. Perkembangan perpustakaan di Indonesia pernah mengalami masa surut atau kemunduran dalam tahun-tahun enam puluhan.

Dari pengalaman sejarah, pembangunan perpustakaan dapat berjalan lancar bilamana ekonomi dan politik stabil, ada kemakmuran yang merata. Dengan keadaan ekonomi Indonesia, semakin lama semakin memburuk sehingga pemerintah tidak mampu lagi menyediakan biaya pengadaan buku dan majalah. Gaji pustakawan pun digerogeti inflasi yang tinggi. Hal ini semakin terasa pada tahun-tahun pertama dasawarsa 1960-an sehingga TPR semakin ditinggalkan pembacanya karena koleksinya tidak pernah bertambah. Situasi buruk ini timbul lagi dengan pecahnya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Praktis tidak ada pembangunan perpustakaan karena pemerintah memusatkan perhatiannya pada stabilitas ekonomi dan politik.

Baru pada tahun 1969, dengan dimulainya Pembangunan Lima Tahun (PELITA), perpustakaan mulai memperoleh dana lagi sehingga sedikit demi sedikit perpustakaan mulai giat kembali. Oleh karena itu, tahun 1969 dianggap sebagai tonggak kebangkitan kembali perpustakaan Indonesia.

Setelah tahun 1974, Pemerintah Pusat menyediakan dana pembangunan, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya, kehidupan perpustakaan mulai bergairah. Dalam kurun waktu antara 1974 sampai 1980 banyak dilaksanakan kegiatan inventarisasi, rehabilitasi, penelitian, percobaan, dan perencanaan.

Kegiatan perencanaan yang terpenting berupa finalisasi perencanaan pendirian Perpustakaan Nasional dan Sistem Nasional Perpustakaan. Secara berturut-turut dalam bulan September terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Mei 1980 Nomor 0164/0/1980, tentang Perpustakaan Nasional. Tanggal 2 September 1980, Nomor 022/a/1980, tentang pembentukan Perpustakaan Wilayah di 6 provinsi selain 19 yang telah ada belum termasuk provinsi Timor Timur. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0022g/O/1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat dilingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang membawa perubahan-perubahan dalam tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparat pembina.

Dengan terbitnya keputusan-keputusan tersebut, kondisi dunia perpustakaan telah mantap bagi tersusunnya suatu Sistem Nasional Perpustakaan. Pada tanggal 11 Maret 1981 terbitlah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/0/1981, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia.

Dalam perkembangannya sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1989, Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, dan ke-26 Perpustakaan Wilayah diintegrasikan dalam satu wadah dengan nama Perpustakaan Daerah. Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Perpustakaan-perpustakaan Daerah pembinaannya diserahkan ke masing-masing daerah otonom dengan sebutan sebagai Badan Perpustakaan Daerah.

Saat ini meskipun hasil budaya terekam (noncetak) makin banyak masuk ke dalam perpustakaan, namun buku dan hasil budaya tercetak lainnya masih merupakan bagian bahan pustaka terbesar. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama dari segi pengadaan, pelestarian, penyebaran, dan pemanfaatannya

Perkembangan perpustakaan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang menggembirakan berkat kerja keras Perpustakaan Nasional RI dengan dukungan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta, LSM, individu serta pemerhati perpustakaan dan segenap unsur pendidikan. Meskipun demikian, pembinaan dan pengembangan perpustakaan harus senantiasa ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya serta lebih merata kesemua lapisan masyarakat.

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kurang kuatnya landasan hukum dalam penetapan kebijakan bidang perpustakaan. Namun, pada akhirnya kita semua bersyukur karena sebuah undang-undang yang dinantikan telah terbit dengan nama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sejarah mencatatnya sebagai sebuah prestasi tersendiri dari dan oleh insan perpustakaan setelah cukup lama diperjuangkan yang diharapkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia.

## **E. TIPE-TIPE PERPUSTAKAAN**

Tujuan utama sebuah perpustakaan adalah menyediakan layanan akses informasi bagi pemakai. Keberadaan perpustakaan sangat bermanfaat, tetapi sering kali dihadapkan pada permasalahan dalam hal akuisisi (pengadaan), penyimpanan, dan penanganan dokumen maupun berkas-berkas sesuai kebutuhan. Dengan perkembangan perpustakaan dari model perpustakaan yang sederhana sampai seperti dewasa ini, hambatan yang dialami adalah

munculnya pemakaian teknologi informasi sebagai sarana penyedia layanan sehingga perubahan ini sangat berpengaruh pada metode akuisisi, penyimpanan, pengiriman atau prosedur penelusuran. Untuk mencapai tujuan agar perpustakaan tidak ketinggalan jauh dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi, upaya dalam hal perbaikan teknologi harus terus-menerus dilakukan agar seluruh kegiatan pengelolaan perpustakaan dapat bekerja dengan lebih cepat, akhirnya dapat menjangkau pemakai yang lebih banyak.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berimbas juga ke pengelolaan perpustakaan, mengakibatkan adanya paradigma baru dalam bidang perpustakaan. Perubahan tersebut sangat terlihat pada kinerja dan layanan perpustakaan. Perubahan-perubahan paradigma dalam kinerja dan layanan perpustakaan menurut Lasa (2002), antara lain adalah.

1. Perubahan orientasi pustakawan dari penjaga koleksi menjadi penyedia informasi.
2. Perubahan pengguna yang awalnya hanya membutuhkan satu media menjadi multimedia.
3. Dari sisi pengolahan koleksi yang tadinya diolah oleh perpustakaan sendiri beralih ke sistem pengolahan koleksi secara global.
4. Masyarakat biasanya yang mendatangi perpustakaan. Dengan adanya perubahan, perpustakaan harus lebih aktif untuk mendatangi pengguna, apabila menginginkan perpustakaannya tetap dikunjungi oleh pengguna.
5. Layanan perpustakaan secara lokal bersifat tradisional beralih menjadi layanan global dan otonomi.

Perkembangan teknologi yang sudah mengimbas kemana-mana, termasuk perpustakaan, mengakibatkan skala operasional juga meningkat dan otomatis perbaikan kearah yang lebih teknis harus dilakukan sehingga muncullah tipe perpustakaan yang berbasis pada penggunaan teknologi.

Sebelum berbicara mengenai tipe-tipe perpustakaan berbasis teknologi, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu perkembangan teknologi dalam bidang *record* informasi (penyimpanan informasi) mulai dari awal. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan media penyimpanan informasi yang ada di perpustakaan. Sebelum teknologi mesin cetak ditemukan oleh Guttenberg, media penyimpanan informasi berupa batu, kayu, kulit domba, dan sebagainya. Setelah ditemukan mesin cetak, media penyimpanan berubah menjadi berupa kertas. Era ditemukannya

mesin cetak, menyebabkan produksi informasi menjadi meningkat tajam, diikuti pula dengan peningkatan jumlah pemakai. Oleh karena derajat keasamannya tinggi maka media penyimpanan informasi dari kertas dianggap tidak mampu bertahan lama, kemudian muncul teknologi penyimpanan lain dengan media film (plastik). Media penyimpanan film berkembang sehingga muncul bentuk mikro.

Perkembangan media penyimpan tidak hanya sampai dengan bentuk film maupun mikro, bentuk lebih ringkas muncul seiring dengan munculnya teknologi komputer. Bentuk ini ditandai dengan munculnya media penyimpan elektronik dalam bentuk disket, kemudian diikuti dengan munculnya CD-ROM. Perkembangan media penyimpanan tersebut pada akhirnya berpengaruh pada kegiatan perpustakaan.

Munculnya teknologi komputer (informasi) yang mampu mempersingkat dan mempermudah sistem kerja manusia juga mulai dikenal dalam lingkungan perpustakaan. Keuntungan penggunaan komputer ini diharapkan mampu menggantikan kegiatan-kegiatan perpustakaan yang bersifat repetitif (maksudnya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang). Komputer juga bermanfaat sebagai alat komunikasi dan pertukaran informasi yang semakin dipermudah dengan berkembangnya teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan lebih mempermudah pemakai untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh perpustakaan di tempat lain sehingga terjalin komunikasi antarperpustakaan. Komunikasi juga dapat terjadi antarlembaga informasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Teknologi jaringan komputer semakin merebak di tingkat nasional maupun internasional. Teknologi jaringan baik internet maupun intranet memungkinkan kemudahan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi. Pengaruh teknologi (terutama teknologi komputer dan telekomunikasi), ternyata sangat besar bagi perpustakaan. Telah disebutkan di atas bahwa pengaruh adanya perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya tipe-tipe perpustakaan yang berbasis teknologi, antara lain perpustakaan kertas, perpustakaan terotomasi, dan perpustakaan elektronik. Selain ketiga tipe perpustakaan ada satu tipe lagi, yaitu perpustakaan hibrida. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan peralihan antara terotomasi dan elektronik.

### 1. Perpustakaan Kertas (*Paper Library*)

Perpustakaan dengan tipe seperti ini, teknik operasional (seperti pembelian, pengolahan, pengkatalogan dan sirkulasi) dan koleksi bahan pustaka (terutama teks) masih berbasis pada kertas dan karton. Boleh dikatakan, perpustakaan jenis ini masih menyimpan koleksi bahan pustaka dari kertas, ada juga koleksi selain kertas, misalnya *clay tablets*, *vellum*, film dengan frekuensi yang sangat sedikit. Layanan yang dijalankan pada perpustakaan kertas pun masih seperti perpustakaan-perpustakaan di Indonesia pada umumnya, sebelum muncul teknologi informasi.

### 2. Perpustakaan Terotomasi (*Automated Library*)

Penerapan teknologi informasi terutama teknologi komputer untuk kepentingan perpustakaan sehingga yang terotomasi adalah teknik operasional perpustakaan, seperti pengadaan, sirkulasi, pengolahan, serta keperluan administrasi perpustakaan. Sementara itu bahan pustaka masih berbentuk kertas sebagai mediana.

### 3. Perpustakaan Elektronik (*Electronic Library*)

Tipe perpustakaan elektronik baik bahan pustaka maupun teknik operasional perpustakaan berubah ke bentuk elektronik.

Konsep perpustakaan elektronik bahan pustaka yang tersedia dalam bentuk terbaca mesin (*machine readable*), pemakai akan berminat untuk mengakses secara langsung dan keinginan akses akan tersedia. Secara spekulatif seseorang dapat menyeimbangkan antara bahan pustaka kertas dengan elektronik apabila dikehendaki, seseorang dapat mengubah menjadi perpustakaan tanpa kertas (*paperless libraries*). Namun, masalah ini sesungguhnya tidak signifikan apabila diperbandingkan dengan asumsi akses terhadap bahan pustaka elektronik yang direncanakan akan selalu tersedia. Saat ini, perpustakaan sudah mulai menjadi “Perpustakaan Terotomasi” yang diharapkan tidak terlalu lama menuju ke “Perpustakaan Elektronik”.

Perubahan operasional perpustakaan menjadi berbasis komputer serta ketersediaan bahan pustaka elektronik menunjukkan perubahan yang radikal terutama dalam pelayanan perpustakaan. Bentuk/wujud bahan pustaka elektronik sangat berbeda dengan bahan pustaka cetak dengan media kertas dan bentuk mikro. Perpustakaan yang mempunyai koleksi bahan pustaka dalam bentuk elektronik bertujuan penyebaran informasi untuk kalangan

yang lebih luas karena tipe perpustakaan, seperti ini koleksinya dapat diakses dengan cara berikut ini.

- a. Jarak jauh.
- b. Lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.
- c. Untuk lebih dari satu kepentingan.

Sebenarnya perpustakaan elektronik itu merupakan sebuah jaringan kerja, apalagi dengan cara akses koleksi, seperti tersebut di atas. Apabila suatu perpustakaan akan mengembangkan menjadi perpustakaan elektronik, harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain (Saptari, 2004) berikut ini.

- a. Interaksi dan sirkulasi perpustakaan. Pertimbangannya pengguna dapat berinteraksi keseluruhan jaringan atau hanya perpustakaan tertentu.
- b. Mata rantai pemakai/pengguna, yaitu mata rantai komunikasi perpustakaan dengan pemakai. Pertimbangan yang perlu diambil adalah pengguna langsung datang atau menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, seperti telepon dan *email*.
- c. Mengatur distribusi dana. Perlu dikembangkan kebijakan mengenai titik jasa atau perpustakaan elektronik yang bertanggung jawab atas sumber serta bagaimana cara sumber tersebut dimanfaatkan pihak lain. Ini menyangkut pembiayaan sumber informasi dan pembagian dana untuk perpustakaan anggota jaringan.
- d. Bentuk jaringan. Bentuk jaringan yang akan dilaksanakan berdasarkan sistem perpustakaan dewasa yang ada atau mencari sistem lain.

Untuk lebih memperjelas perbedaan dari ketiga tipe elektronik di atas baca tabel berikut.

Tabel Kegiatan Perpustakaan berbasis Teknologi dan Bahan Pustaka

Tipe	Teknik Operasional	Bahan Pustaka
Perpustakaan Kertas	Kertas	Kertas Kertas
Perpustakaan Terotomasi	Komputer	Kertas
Perpustakaan Elektronik	Komputer	Media Elektronik

Dalam proses pengembangan perpustakaan, ada saat masa transisi. Pada masa ini pengembangan dari tipe “perpustakaan tradisional” yang berbasis

koleksi cetak (*hardcopy*) ke tipe “perpustakaan baru” berbasis informasi elektronik. Perpustakaan masa transisi dikenal dengan Perpustakaan Hibrida (*The Hybrid Library*).

Perpustakaan hibrida adalah perpaduan antara “perpustakaan baru” berbasis informasi elektronik dengan “perpustakaan tradisional” yang berbasis informasi cetak. Keduanya saling berdampingan dan bersama-sama secara terintegrasi dalam memberikan layanan informasi. Akses yang disediakan dapat melalui pintu gerbang elektronik yang tersambung dengan internet (LAN) maupun sebagaimana layaknya perpustakaan tradisional. Berikut perbedaan perpustakaan hibrida dengan tipe perpustakaan yang tersedia pada situs web (*website*). *Pertama*, disatu sisi informasi dalam bentuk cetak tetap dipertahankan dan disisi lain sumber informasi dalam bentuk elektronik mulai disediakan. *Kedua*, berusaha memusatkan perhatian dan memberikan layanan pada pemakai secara utuh baik “subjek spesifik maupun umum” untuk kelompok pemakai tertentu.

Istilah perpustakaan hibrida (*Hybrid Library*) dipopulerkan oleh *UK Electronic Libraries Program (eL.Lib)*. Sementara orang menyatakan bahwa perpustakaan hibrida merupakan masa transisi antara perpustakaan tradisional dengan digital (Sutton, 1996; Oppenheim and Smithson, 1999; Rusbridge, 1998), sementara yang lain menyebutnya sebagai model yang masuk akal, merupakan modal awal yang luar biasa dari sumber informasi cetak menuju perubahan budaya yang dituntut untuk menuju ke penyebaran informasi digital yang sesungguhnya.

Di Indonesia, perpustakaan hibrida lebih dikenal dengan perpustakaan alternatif sehingga muncul istilah kepustakawanan alternatif yang diperkenalkan oleh Meiling Simanjuntak (1996), dikatakan bahwa peran pustakawan dalam masyarakat adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi demi keuntungan masyarakat sendiri. Dengan kata lain, fungsi pustakawan adalah menjadi mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi, bukan hanya buku, tetapi termasuk sumber-sumber informasi dalam media lain. Tujuan perpustakaan alternatif adalah untuk menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan terekam (sumber informasi) dengan cara yang sebaik mungkin (Gapen). Sebagai mediator antara masyarakat dan sumber informasi, peran pustakawan dalam menjalankan tugasnya saling terkait dan saling memengaruhi dengan media informasi yang tersedia. Telah dibicarakan di depan, kehadiran media elektronik sebagai alternatif bagi media cetak memengaruhi cara-cara

pustakawan menjalankan perannya agar tetap maksimal, tetapi perlu diingat bahwa media cetak belum dan tidak akan tergantikan oleh media elektronik. Keduanya masih terus akan berdampingan, saling melengkapi meskipun tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan media elektronik sangat cepat dan akan memengaruhi dominasi kertas sebagai media informasi. Oleh sebab itu, kepastakawanan yang berlandaskan kertas masih tetap dibutuhkan, tetapi pada saat yang sama, kepastakawanan virtual dan digital semakin diperlukan.

Pustakawan perlu menyadari bahwa perlu ditumbuhkan suatu jenis kepastakawanan dengan paradigma-paradigma baru yang mampu menjawab tantangan media elektronik tanpa meninggalkan kepastakawanan konvensional yang memang masih dibutuhkan. Kepustakawanan alternatif yang dapat menangkai marginalisasi pustakawan ini harus menjadi bagian dari perkembangan kepastakawanan konvensional dan tetap menyadari bahwa kemampuan maupun level digitalisasi dan virtualisasi berbeda-beda antarperpustakaan. Sebagian perpustakaan di Indonesia masih harus beroperasi apa adanya, sebagian lagi berpotensi untuk bergabung dengan perpustakaan jaringan dan memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi. Hanya sebagian kecil yang sudah mampu memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi interaktif sehingga dapat merambah/menembus ribuan pusat informasi dalam memenuhi kebutuhan pemakainya, sedangkan sebagian kecil lainnya dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan unjuk kerja perpustakaan Indonesia secara umum dengan menyediakan diri sebagai penyambung antara perpustakaan yang belum dan yang sudah virtual.

Kepustakawanan alternatif perlu menciptakan dasar-dasar perpustakaan virtual yang memungkinkan pustakawan konvensional mengakses informasi elektronik dengan mudah, tanpa menjadi pakar teknologi, mengupayakan digitalisasi informasi ilmiah yang banyak dibutuhkan (*lowly*), dan mengupayakan hubungan terpasang (*online*), pulsa murah antara perpustakaan kecil dengan perpustakaan besar. Dengan upaya-upaya ini, kesenjangan informasi diharapkan tidak akan terlalu lebar dan masyarakat tidak jatuh pada kesenjangan baru, yaitu kaya informasi dan miskin informasi.

#### **4. Perpustakaan Komunitas**

Sejak zaman dahulu hingga sekarang tujuan perpustakaan selalu identik dengan tujuan masyarakat. Hal ini terjadi karena perpustakaan merupakan hasil ciptaan masyarakat, bukan sebaliknya. Sepanjang sejarah, perpustakaan

selalu membantu penyebarluasan pendidikan dengan cara menyediakan kemudahan belajar. Hubungan yang erat antara masyarakat dengan perpustakaan juga nampak pada gedung perpustakaan. Perpustakaan dianggap pranata penting sehingga orang-orang pada zaman dahulu selalu menempatkan perpustakaan di kuil, istana, biara, atau katedral serta tempat lain yang dianggap penting. Hal tersebut mencerminkan pentingnya perpustakaan sebagai hasil ciptaan masyarakat.

Karena perpustakaan diciptakan masyarakat, masyarakat pun berusaha memelihara hasil karyanya. Hal ini dalam sejarah perpustakaan, gangguan terhadap perpustakaan lebih banyak berasal dari luar perpustakaan, misalnya dari revolusi, gejolak politik, maupun pertentangan agama. Di Indonesia, pada tahun 1960-an terjadi pembakaran oleh PKI terhadap majalah dan buku yang dianggap ciptaan neokolonialisme dan imperialisme maupun karya pengarang yang tergabung dalam kelompok Manifesto Kebudayaan. Tindakan pembakaran ini dibantah oleh terbitnya buku *Trilogi: Lekra Tak Membakar Buku*, oleh Rhoma Dwi Aria Yulianti dan Muhidin M Dahlan, penerbit Merekesumba, Jogjakarta, Oktober 2008. Namun, buku ini dilarang beredar. Pemerintah masih melarang buku yang dianggapnya mengajarkan Marxisme, Leninisme dan Komunisme, padahal kalau dilihat dari isinya bisa bertolak belakang dengan dugaan penguasa.

Pada 20 Juli 2009 terjadi tindakan yang ironis, Kejaksaan Negeri Depok membakar 1.247 buku sejarah, bahan pelajaran sekolah menengah pertama dan atas, karya guru-guru sejarah. Pembakaran ini dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bambang Bachtiar, Kepala Dinas Pendidikan Asep Roswanda dan Walikota Nurmahmudi Ismail.

Penyitaan maupun pembakaran buku-buku sejarah ini juga terjadi di Bogor, Indramayu, Kendari, Kuningan, Kupang, Pontianak, Purwakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Dasar hukumnya, menurut para jaksa, adalah keputusan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada Maret 2009 di mana Kejaksaan Agung melarang buku-buku itu yang dibuat dengan dasar kurikulum pendidikan tahun 2004. Mereka dituduh tak mencantumkan kata "PKI" dalam menerangkan Gerakan 30 September 1965. Penelitian terhadap isi buku-buku sejarah itu dilakukan Kejaksaan Agung atas permintaan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo.

Sepanjang sejarah selalu ada usaha untuk menghancurkan buku yang disimpan di perpustakaan. Sebaliknya pula, masyarakat pun berusaha mengamankan perpustakaan. Secara fisik, pengamanan perpustakaan kuno

dilakukan dengan menempatkan perpustakaan (baca buku) dibagian yang aman pada sebuah kuil atau istana. Kuil atau istana merupakan bangunan yang kokoh sehingga buku akan lebih aman disimpan di tempat tersebut daripada di tempat lain. Dalam berbagai gejolak sosial maupun revolusi, keberadaan perpustakaan selalu tidak dilupakan masyarakat. Di Indonesia, semasa pendudukan Jepang (1942-1945), tindakan pertama bala tentara Jepang ialah mengamankan koleksi *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap* di Batavia (kini Jakarta). Koleksi ini kelak menjadi inti Perpustakaan Nasional RI. Sebelum itu, ketika Majapahit runtuh, bangsawan maupun biarawan menyelamatkan berbagai naskah kuno ke tempat lain.

Dari uraian di atas, Anda dapat menyimpulkan bahwa kekuasaan di luar perpustakaan dapat merupakan kekuatan yang dapat menghancurkan perpustakaan. Sebaliknya pula, masyarakat (merupakan kekuatan di luar perpustakaan namun perpustakaan merupakan bagian darinya) pulalah yang menciptakan sekaligus memelihara perpustakaan. Gejala yang muncul saat ini adalah tumbuhnya berbagai perpustakaan komunitas.

Dessy Sekar Astina pegiat dunia literasi dan Direktur Program Forum Indonesia Membaca, menurunkan artikelnya “Perpustakaan Komunitas dan perkembangannya” di posted on: October, 29th 2007

(<http://ypr.or.id/id/posting/perpustakaan-komunitas-dan-perkembangannya.html>, 04-01-2010) menyatakan: “Pemerintah Kota Yogyakarta mensubsidi perpustakaan komunitas Rp500 juta” (Suara Merdeka, 28/02/08) yang diserahkan kepada 110 perpustakaan sebagai bagian penancangan gerakan 1000 perpustakaan di tiap RW atau kampung. Ini tentu saja menjadi angin segar bagi para penggiat dunia literasi khususnya di kota Yogyakarta. Namun seberapa besarkah efektivitas gerakan ini di tengah wabah pendirian perpustakaan komunitas? Mari kita simak gambar besarnya.

Adalah hal yang ideal apabila kemajuan peradaban bangsa dibangun oleh struktur masyarakat madani dengan basis pendidikan yang mumpuni sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh hak, kewajiban dan apa yang selanjutnya bisa dilakukan untuk dirinya dan bangsanya. Salah satu media menuju masyarakat madani adalah keberadaan komunitas. Perpustakaan komunitas adalah sebuah tempat dimana masyarakat berkumpul secara aktif bersama-sama melalui berbagai macam proses, yang melibatkan lingkungannya dalam mendisain, membuat perubahan dan belajar dari proses yang dijalaninya serta menciptakan

kepemilikan lokal dalam berbagi jalan keluar dan tanggung jawab hingga membentuk jejaring yang kuat.

Perpustakaan komunitas atau taman bacaan masyarakat banyak yang tumbuh sesaat bagi cendawan dimusim hujan. Hanyalah sekedar lahan dan melihat peluang besar untuk memperoleh kucuran dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Biasanya setelah bantuan berakhir maka habislah kegiatan tersebut atau tetap bertahan jika para pengelolanya cukup kreatif mencari bantuan pendanaan lainnya. Ini hal yang ironis tentunya.

Perpustakaan komunitas yang dibangun oleh para pegiat dunia literasi biasanya difokuskan pada anak-anak dan remaja “para pemeluk masa depan” dan dibiayai oleh perorangan, kelompok maupun pihak-pihak lain yang peduli dalam pengembangan aktivitas literasi sehingga terkesan bersahaja. Namun, dibalik kesederhanaannya penuh dengan segudang ide dan kreativitas yang informatif, mendidik dan menghibur.

Pembentukan perpustakaan komunitas bisa dimulai dimana saja setiap saat. Ruang tamu, beranda rumah, teras belakang, pos ronda, kebun kosong bahkan trotoar bisa dimanfaatkan sebagai area perpustakaan. Pengadaan koleksi bisa dimulai dari koleksi pribadi dan atau mengumpulkan dari rumah-rumah dilingkungan sekitar perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan bisa dilakukan oleh pemiliknya langsung atau dilakukan bersama-sama oleh anggota komunitas bahkan anak-anak bisa dididik untuk juga berperan menjadi pustakawan cilik sehingga menjadi kegiatan dan kepemilikan bersama. Pilihan aktivitas dan peran bisa didiskusikan dan dievaluasi bersama sehingga perpustakaan ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya.

Salah satu perpustakaan komunitas yang berhasil bertahan dan berkembang adalah Rumah Dunia yang digagas tahun 2002 oleh Gola Gong dan Tias Tatanka, dibangun di kebun belakang rumah. Saat ini dikomandoi oleh Firman Venayaksa telah berkembang menjadi pusat aktivitas literasi tidak hanya bagi warga Ciloang bahkan dari kota kabupaten lain seperti Serang, Pandeglang dan Merak. Rumah Dunia mengembangkan kegiatan literasi secara rutin sehingga para relawan dapat meningkatkan keahlian bahkan menelurkan banyak penulis dan jurnalis baru.

Sering kali perpustakaan jarang dikunjungi oleh masyarakat dengan berbagai alasan namun yang paling sering ditunding adalah rendahnya minat baca masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut tentang minat baca, mungkin kita perlu tahu apa arti minat baca. Minat baca (*reading interest*) adalah kecenderungan pilihan seseorang terhadap sumber bacaan. Pemilihan

ini bisa dilakukan berdasarkan format bahan bacaan (buku, majalah, koran, komik, *e-book*, dan lain-lain), jenis (fiksi atau nonfiksi), subyek (biografi, sejarah, seni, sastra), genre, pengarang, usia, jenis kelamin dan sebagainya. Sedangkan budaya baca adalah sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Minat baca muncul ketika seseorang telah memiliki kemampuan membaca, sedangkan budaya baca terpelihara bila bahan baca terjangkau dan jenis yang tersedia sesuai dengan minat pembacanya. Budaya baca dapat terwujud baik karena keinginan pribadi maupun bentukan lingkungan yang kondusif.

Kemampuan literasi (dalam makna sempit adalah membaca dan menulis) merupakan piranti seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup, dimana kemampuan ini bisa diasah melalui kegiatan di perpustakaan komunitas. Bila hal ini telah disadari maka keberadaan perpustakaan akan makin berkembang, menjadi kepemilikan masyarakat setempat serta bertahan mengarungi waktu.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Berikan arti pustaka dan kata turunannya!
- 2) Fungsi perpustakaan yang tadinya sebagai pengelolaan data berkembang menjadi pengelolaan informasi dan selanjutnya menjadi pengelolaan pengetahuan. Mengapa hal itu terjadi?
- 3) Jelaskan jenis-jenis perpustakaan yang ada di Indonesia sesuai UU RI No.43 Tahun 2007!
- 4) Pengaruh perkembangan TI menjadikan perpustakaan dalam berbagai tipe. Sebut dan jelaskan tipe-tipe tersebut!
- 5) Mengapa di Indonesia, perpustakaan hibrida lebih dikenal dengan perpustakaan alternatif sehingga muncul istilah kepustakawanan alternatif?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk menjawab soal-soal latihan di atas, dianjurkan Anda membaca kembali uraian tentang Perpustakaan, Pustakawan dan Kepustakawanan di atas, khususnya bagian-bagian yang belum Anda mengerti secara jelas.



## RANGKUMAN

---

Pengertian perpustakaan pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah gedung atau ruangan yang menyimpan berbagai macam bahan pustaka yang diatur menurut sistem tertentu, melainkan suatu sumber pengetahuan. Apabila hendak mengetahui suatu perpustakaan secara menyeluruh, sebaiknya dipahami lebih dulu apa arti, tujuan, dan fungsi perpustakaan tersebut didirikan.

Dengan memahami arti, tujuan/misi, dan fungsi perpustakaan maka dapat diketahui ternyata ada berbagai jenis perpustakaan yang selama ini dikenal di masyarakat. Walaupun ada berbagai jenis perpustakaan, namun masih mempunyai kesamaan fungsi, yaitu penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi.

Diundangkannya UU RI Nomor 43 Tahun 2007 maka jenis-jenis perpustakaan dirumuskan dengan jelas.

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan media penyimpanan informasi yang ada di perpustakaan serta teknologi informasi (TI) memengaruhi juga prosedur kegiatan rutin perpustakaan, seperti pengolahan dan layanan terutama penelusuran *literature*.

Pengaruh perkembangan TI menjadikan perpustakaan dalam berbagai tipe, antara lain perpustakaan kertas, perpustakaan terotomasi, perpustakaan elektronik dan perpustakaan hibrida.

Perkembangan perpustakaan sampai saat ini tidak mungkin terlepas dari sejarah perkembangan perpustakaan dari mulai diakuinya perpustakaan sampai dengan perpustakaan yang terpengaruh dengan adanya TI.

Sejarah perkembangan perpustakaan sebenarnya tergantung dengan keadaan sosial, ekonomi serta masyarakat di suatu negara. Semua ini dialami perpustakaan-perpustakaan di Indonesia yang benar-benar sangat tergantung pada keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari masa ke masa.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perpustakaan adalah suatu unit yang mempunyai koleksi minimal 1000 judul. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ....
  - A. perpustakaan
  - B. pustakawan

- C. kepastakaan
  - D. Ilmu Perpustakaan
- 2) Salah satu faktor timbulnya berbagai jenis perpustakaan adalah dengan adanya berbagai ....
- A. layanan yang ditawarkan perpustakaan
  - B. jenis media informasi
  - C. pengertian tentang perpustakaan
  - D. macam institusi yang memerlukan jasa perpustakaan
- 3) Indonesia mengenal adanya perpustakaan pada saat pemerintahan Hindia Belanda karena awal berdirinya perpustakaan pada masa ....
- A. Kerajaan Mataram
  - B. VOC
  - C. penjajahan Jepang
  - D. Kerajaan Sriwijaya
- 4) Perpustakaan yang didirikan oleh swasta pada masa pemerintahan Hindia Belanda bernama ....
- A. *Volksbibliotheek*
  - B. *Openbarelee zalen*
  - C. *Volkslectuur*
  - D. *Volkschool*
- 5) Tahun 1969 dianggap sebagai tonggak kebangkitan perpustakaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena mulai ....
- A. diperolehnya dana kembali dari pemerintah
  - B. diperhatikan kembali oleh pemerintah
  - C. dikunjungi lagi oleh penggunanya
  - D. diakui sebagai sumber ilmu pengetahuan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C. Norma dan standar profesi.
- 2) B. Tegaknya kehormatan profesi tidak terlalu mengharap upah materiil, dilandasi kompetensi, dikontrol kode etik profesi.
- 3) D. Kinerja merupakan totalitas kerja intelektual maupun keterampilan.
- 4) C. Profesi memerlukan keahlian dan keterampilan, memiliki organisasi profesi, berorientasi pada jasa, dan memiliki kode etik profesi.
- 5) B. Kompetensi, Kode etik, dan budaya profesi.

### *Tes Formatif 2*

- 1) A. Ada berbagai pengertian perpustakaan, salah satunya menyebutkan bahwa suatu unit yang memiliki koleksi minimal 1000 judul sudah dianggap suatu perpustakaan.
- 2) B. Salah satu faktor terjadinya jenis-jenis perpustakaan adalah dengan bermunculan media-media informasi.
- 3) B. Awal dibukanya perpustakaan pada masa V.O.C. masuk di Indonesia walaupun masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia telah mempunyai koleksi tulisan-tulisan dari para pujangga, tetapi penggunaannya masih dari kalangan terbatas.
- 4) B. *Openbareleezalen* berarti ruang baca yang terbuka untuk umum yang didirikan oleh pihak ke Gereja Katolik, *theosofische* jadi pendirinya bukan dari pemerintah.
- 5) A. Setelah keadaan ekonomi negara Indonesia yang tidak menentu pada masa G30S/PKI, tahun 1969 dengan dimulainya PELITA maka perpustakaan mulai mendapatkan dana untuk pengembangan.

## Daftar Pustaka

- Apostel, Richard and Boris Raymond. (1997). *Librarianship and The Information Paradigm*. London: The Scarecrow Press.
- Assegaf, Djafar H. (1990). "Era Informasi kini dan masa mendatang". *Dalam Indonesia dalam Era Globalisasi: Dimensi Asia Pasifik Abad ke-21*. Jakarta: Bank Suma.
- Gates, Jean Key. (1989). *Introduction to Librarianship*. 3<sup>rd</sup> Ed. New York: McGraw Hill.
- Hermawan S., Rachman dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Himpunan Lengkap (1951-1990). *Peraturan Perundang-undangan tentang Perpustakaan & Perbukuan Indonesia*. Disusun oleh Djadjuliyanto, dkk. Jakarta: BP Muara Agung.
- Kismiyati, Titiek. "Standar Kompetensi Pustakawan". *Media Pustakawan*, 13( 1 dan 2) Juni 2006: 2-6.
- Magnis-Suseno, Franz. (1988). *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marco, Guy A. (1996). "Ethics for librarians: A Narrow view", *Journal of Librarianship and Information Science*, 28(1) March: 33-38.
- Mallinger, Stephen M. (2003). *Librarianship: Where We are Where We Seen to Be Going*.
- Lasa, H.S. (2002). "Eksistensi Perpustakaan dalam Masyarakat Informasi". *Media Pustakawan*. Vol. 9 No.1, p. 13-16.

- Nurhadi, Muljani A. (1983). *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Santoso, Joko. (2001). “Manajemen Perpustakaan Berbasis Pengetahuan Melihat Peran Pustakawan ke Depan”. *Visi Perpustakaan*. Vol. 3 No.1, p. 1 –6.
- Sulistyo, Basuki. (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- \_\_\_\_\_. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Modul 1-9. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tjoen, Mohd. Joesoef. (1966). *Perpustakaan Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Djakarta: Kantor Bibliografi Nasional.
- Wignjosoebroto, Sritomo. “Etika Profesional: Pengalaman & Permasalahan”, Makalah Pengantar untuk Perbincangan Tentang *Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional*. <http://zkarnain.tripod.com/16-04-2010>
- Wiji Suwarno. (2010). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Razz Media.